

- (2) Kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanda pengenal urusan sesuai fungsi dan tugas unit kerja serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan arsip.

### Pasal 3

Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOPPI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	sekda	
2		
3	Asisten. CA	
4	Kabac. Hukum	
5	Kadis. Propusda	

Ditctapkan di Rumbia,  
pada tanggal, 1 APRIL 2021

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia,  
pada tanggal, 1 APRIL 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN AREA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR 31

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 31 TAHUN 2021

TANGGAL : 1 APRIL 2021

TENTANG : KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

**KODE KLASIFIKASI ARSIP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**

**A. UMUM**

1. Klasifikasi Kearsipan disusun berdasarkan masalah, mencerminkan fungsi dan kegiatan pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.
2. Klasifikasi diperinci secara desimal, dengan mempergunakan tiga angka dasar.
3. Klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus dalam hubungan masalah, dengan penulisan Klasifikasi sebagai berikut:

**1 4 5**

100 : Pokok Masalah tentang PEMERINTAHAN

140 : Sub Masalah tentang PEMERINTAH DESA /KELURAHAN

145 : Sub Masalah ADMINISTRASI DESA /KELURAHAN

4. Rincian Klasifikasi yang Menampung masalah-masalah fasilitas dan substansi SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, adalah

**000 UMUM**

010 URUSAN DALAM

020 BARANG DAN JASA/PERALATAN

030 KEKAYAAN DAERAH

040 PERPUSTAKAAN / DOKUMEN / KEARSIPAN / SANDI

050 PERENCANAAN DAN EVALUASI

060 ORGANISASI / KETATALAKSANAAN

070 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

080 KONFERENSI / RAPAT KOORDINASI

090 PERJALANAN DINAS

## **100 PEMERINTAHAN**

- 110 PEMERINTAHAN PUSAT
- 130 PEMERINTAHAN KABUPATEN
- 140 PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN
- 150 LEGISLATIF MPR / DPR / DPD
- 170 DPRD KABUPATEN
- 180 HUKUM
- 190 HUBUNGAN LUAR NEGERI

## **200 POLITIK**

- 210 KEPARTAIAN
- 220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- 230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL
- 240 ORGANISASI PEMUDA
- 250 ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN
- 260 ORGANISASI WANITA
- 270 PEMILU, PILKADA
- 280 PENGAWASAN PEMILU / PILKADA

## **300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM**

- 310 PERTAHANAN
- 320 KEMILITERAN / TNI
- 330 KEAMANAN
- 340 PERTAHANAN SIPIL
- 350 KEJAHATAN
- 360 BENCANA
- 370 KECELAKAAN/SAR
- 380 PENDAMPINGAN, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
- 390 KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN

## **400 KESEJAHTERAAN RAKYAT**

- 410 PEMBANGUNAN DESA / KELURAHAN
- 420 PENDIDIKAN
- 430 KEBUDAYAAN

440 KESEHATAN  
450 AGAMA  
460 SOSIAL  
470 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  
480 MEDIA MASSA  
490 PENGADUAN MASYARAKAT

**500 PEREKONOMIAN**

510 PERDAGANGAN  
520 PERTANIAN  
530 PERINDUSTRIAN  
540 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
550 PERHUBUNGAN  
560 TENAGA KERJA  
570 PENANAMAN MODAL  
580 PERBANKAN MONETER  
590 AGRARIA

**600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN**

610 PENGAIRAN  
620 JALAN  
630 JEMBATAN  
640 BANGUNAN  
650 TATA RUANG KOTA  
660 TATA LINGKUNGAN  
670 KETENAGAAN  
680 PERALATAN PEKERJAAN UMUM  
690 AIR MINUM

**700 PENGAWASAN**

710 BIDANG PEMERINTAHAN  
720 BIDANG POLITIK  
730 BIDANG KEAMANAN / KETERTIBAN  
740 BIDANG KESEJAHTRAAN RAKYAT  
750 BIDANG PEREKONOMIAN  
760 BIDANG PEKERJAAN UMUM  
770 PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK

780 BIDANG KEPEGAWAIAN

790 BIDANG KEUANGAN

**800 KEPEGAWAIAN**

810 PENGADAAN

820 MUTASI

830 KEDUDUKAN

840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI

850 CUTI

860 PENILAIAN

870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN

880 PEMBERHENTIAN

890 PENDIDIKAN PEGAWAI

**900 KEUANGAN**

910 ANGGARAN

920 OTORISASI/SKO

930 VERIFIKASI

940 PEMBUKUAN

950 PERBENDAHARAAN

960 PEMBINAAN KEBENDAHARAAN

970 PENDAPATAN

990 BENDAHARAWAN

**B. RINCIAN.**

<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
<b>000</b>	<b>UMUM</b>
001	Lambang
001.1	Garuda
001.2	Bendera Kebangsaan
001.3	Lagu Kebangsaan
001.4	<i>Daerah Kabupaten</i>
001.41	-
001.42	Kota
002	Tanda Kehormatan / Penghargaan (Khusus untuk Non PNS)
002.1	Bintang
002.2	Satyalencana
002.3	Satyakarya Nugraha
002.4	Penghargaan secara adat
002.5	Penghargaan lainnya (Kalpataru, Upakarti, Adipura, dsb)
003	Hari Raya / Besar

003.1	Nasional (17 Agustus, Hari Pahlawan, Hari Anak, HKSN, dsb)
003.2	Keagamaan
003.3	Hari Ulang Tahun Kabupaten
003.4	Hari-hari Besar Internasional
004	Ucapan
004.1	Terima Kasih
004.2	Selamat
004.3	Mohon Diri
004.4	Bela Sungkawa
004.5	Ucapan Lainnya
005	Undangan
006	Tanda Jabatan
006.1	Pamong Praja
006.3	Pejabat Lainnya
006.2	Jabatan Lainnya
<b>010</b>	<b>URUSAN DALAM</b>
011	Gedung Kantor, termasuk instalasi
012	Rumah Dinas
012.1	Tanah untuk Rumah Dinas
012.2	Perabot untuk Rumah Dinas
012.3	Rumah Dinas Golongan 1
012.4	Rumah Dinas Golongan 2
012.5	Rumah Dinas Golongan 3
012.6	Rumah/Bangunan Lainnya
012.7	Rumah Pejabat Negara
013	Mess/Guest House
014	Rumah Susun/Apartemen
015	Penerangan Listrik/Jasa Listrik
016	Telepon/Faximile/Internet
017	Keamanan/Ketertiban Kantor
018	Kebersihan Kantor
019	Protokol
019.1	Upacara Bendera
019.2	Tata Tempat
019.21	Pemasangan Gambar Presiden/Wakil Presiden
019.3	Audiensi/Menghadap Pimpinan
019.4	Alamat-alamat Kantor Pejabat
019.5	Bandil/umbul-umbul/spanduk
<b>020</b>	<b>BARANG DAN JASA/PERALATAN</b>
020.1	Penawaran
021	Alat Tulis
022	Mesin Kantor
023	Perabot Kantor
024	Alat Angkutan
025	Pakaian Dinas
026	Senjata

027	Pengadaan termasuk pengumuman pengadaan, penunjuk lelang
027.1	Prakualifikasi: rapat persiapan, HPS, penjelasan pekerjaan/ <i>anwijzing</i> , negoisasi, evaluasi
027.2	SPK, Kontrak/Amandemen / Addendum, Teguran
027.3	Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK )
127.4	Serah Terima Pekerjaan
127.5	Pemeriksaan Pekerjaan
127.6	Perpanjangan Waktu / <i>Force majeure</i>
127.7	Denda
127.8	Sanggahan
127.9	Pemeliharaan Barang /Jasa
028	Inventaris
028.1	Pendapatan Barang Milik Negara
028.2	Pemeliharaan Barang Milik Negara
028.3	Penghapusan Barang Milik Negara
<b>030</b>	<b>KEKAYAAN DAERAH</b>
031	Barang-Barang tidak bergerak (tanah, perkebunan, pertanian, hutan, tambak)
032	Barang-Barang tidak bergerak (gedung, asrama, monumen / bangunan bersejarah dll )
033	Tanaman
034	Alat-Alat Berat
035	Hewan
036	Barang Persediaan Dalam Gedung
037	Alat Pengangkut (Darat, Laut, Udara)
038	Peralatan Pabrik, Laboratorium
039	Peralatan Kesehatan / Medis (Rumah Sakit, Balai Pengobatan)
<b>040</b>	<b>PERPUSTAKAAN / DOKUMEN / KEARSIPAN / SANDI</b>
041	Perpustakaan
041.1	Umum
041.2	Khusus
041.3	Perguruan Tinggi
041.4	Sekolah
041.3	Keliling
041.6	Pembinaan Perpustakaan
041.61	Bantuan Buku, Rak
041.7	Penghapusan/ Penyusunan Bahan Perpustakaan
041.9	Kemitraan, Forum Perpustakaan, Kerjasama antar Perpustakaan
042	Dokumentasi
043	-
044	-
045	Kearsipan
045.1	Pola Klasifikasi

045.2	Akuisisi Arsip
045.3	Penyusutan Arsip
045.31	Jadwal Retensi Arsip
045.32	Penilaian Arsip
045.33	Pemindahan Arsip
045.34	Penyerahan Arsip
034.35	Pemusnahan Arsip
045.4	Pembinaan Kearsipan
045.41	Pengawasan
045.42	Bimbingan Kearsipan
045.5	<i>Pemeliharaan, Pelestarian/Konservasi Arsip</i>
045.51	Fumigasi dan Termit Control
045.52	Laminasi
045.53	Alih Media
045.6	Layanan
045.7	Pemasyarakatan
045.71	Pameran
045.72	Penerbitan Naskah Sumber Arsip
045.73	Sosialisasi Kearsipan
045.8	Pengembangan Sistem
045.81	Sistem Kearsipan
045.82	Sistem Jaringan Informasi kearsipan
046	Sandi
047	Telegram, Telex, Radio, ISB
048	Data Elektronik
049	-
<b>050</b>	<b>PERENCANAAN DAN EVALUASI</b>
	Meliputi RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), Musrembang, Musrembangpus, antar Kementerian, Musrembangnas, Musrembangdes
050.1	RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)
050.11	RENSTRA ( Rencana Strategi )
050.12	RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah)
050.13	RENSTRA BAPPEDA
050.2	Program Nasional
050.21	RKP (Rencana Kerja Pembangunan)
050.22	RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga)
050.23	RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)
050.24	Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)
050.25	KUA (Kebijakan Umum Anggaran), KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan PPAS (Penetapan Plafon Anggaran Sementara)
050.26	Jawaban Bupati atas Pandangan fraksi
050.27	Nota Keuangan



050.28	RKT (Rencana Kerja Tahunan)
050.29	RKO (Rencana Kerja Operasional)
051	Laporan
051.1	Laporan Berkala
051.2	LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
052	Evaluasi
052.1	Evaluasi Rencana Strategis
052.11	Evaluasi Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah
052.12	Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
052.13	Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Jangka menengah Kabupaten
052.14	Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
<b>060</b>	<b>ORGANISASI KETATALAKSANAAN</b>
061	Organisasi Instansi Pemerintah
061.1	Susunan Organisasi dan Tata Kerja
061.2	Tata tertib Kantor, Termasuk Pengaturan hari dan jam kerja pegawai
062	Organisasi Badan Non Pemerintah
063	Organisasi Badan Pemerintah
064	Organisasi Semi Pemerintah
065	Ketatalaksanaan
065.1	Tata Naskah Dinas
065.2	Stempel Dinas dan Stempel jabatan
065.3	Papan nama instansi pemerintah / non pemerintah
065.4	Alamat-alamat Kantor dan Pejabat
065.5	Ketentuan Pakaian Dinas dan Atribut
066	Stempel Dinas
067	Standar Operasional Prosedur
068	Evaluasi dan Laporan Ketatalaksanaan
069	Analisis Jabatan
069.1	Pengukuran / Penilaian beban kerja Jabatan Struktural dan Fungsional
069.2	Uraian Jabatan
<b>070</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>
071	Riset meliputi perijinan bagi peneliti, Riset <i>Design</i> , Pembahasan sampai dengan laporan akhir riset
072	Survey
072.1	Krenova (Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat)
072.2	SINAS (Sistem Inovasi Nasional)
072.3	SIDA (Sistem Inovasi Daerah) Meliputi <i>Cluster</i> , Kabupaten, Desa Inovatif
072.4	Inkubator Teknologi dan Bisnis
072.5	Pameran Produk Inovasi / Ristek
072.6	BTC (Bisnis Teknologi <i>Center</i> )
072.7	Raptek (Penerapan Iptek )
072.8	HKI (Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual )

073	Kajian
073.1	Kajian Strategis / diskusi / Forum Group Discussion (FGD)
073.2	Seminar
073.3	Workshop
073.4	Rapat Koordinasi / Rapat Teknis
073.5	Lokakarya
073.6	Diseminasi / Sosialisasi hasil Penelitian
074	Kerjasama Penelitian
074.1	Instansi Pemerintah Pusat / Daerah
074.2	Perguruan Tinggi Negeri / Swasta
074.3	Lembaga swasta Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat
074.4	Lembaga Internasional
075	Perkayasaan
076	Jarlit bang (Jaringan Penelitian dan Pengembangan)
077	Publikasi Ilmiah
077.1	Jurnal Ilmiah
<b>080</b>	<b>KONFERENSI / RAPAT KOORDINASI</b>
081	-
082	Bupati
083	Komponen Eselon lainnya ( termasuk Pimpinan SKPD)
084	Instansi Lainnya ( diluar Kemendagri )
085	Internasional di dalam Negeri
086	Internasional di luar Negeri
<b>090</b>	<b>PERJALANAN DINAS</b>
091	Perjalanan Presiden / Wakil Presiden Ke Daerah
092	Perjalanan Menteri ke Daerah
093	Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)
094	Perjalanan PNS, meliputi Surat Perintah Tugas ( SPT ) dan Surat Tugas
095	Perjalanan Tamu Asing ke Daerah
096	Perjalanan Presiden / Wakil Presiden ke Luar Negeri
097	Perjalanan Menteri Ke Luar Negeri
098	Perjalanan Pejabat Tinggi Ke Luar Negeri
099	Perjalanan Pegawai ke Luar negeri
<b>100</b>	<b>PEMERINTAHAN</b>
<b>110</b>	<b>PEMERINTAHAN PUSAT</b>
111	Presiden, Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan
111.1	Penanggung Jawaban Presiden Kepada MPR
111.2	Amanat Presiden / Amanat Kenegaraan
112	Wakil Presiden, Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan
113	Susunan Kabinet
113.1	<i>Reshuffle</i>
113.2	Penunjukan Menteri <i>ad Intren</i>
113.3	Sidang Kabinet, Sidang Stabilitas Ekonomi, lihat 500.1

114	Kementerian Dalam Negeri
114.1	Amanat Menteri Dalam Negeri
115	Kementrian Lainnya
116	Lembaga Tinggi Negara (DPA, MA, BPK)
117	Lembaga Non Kementerian
118	Otonomi Daerah/Desentralisasi/Dekonsentrasi
119	Kerjasama Antar Kementrian
<b>120</b>	-
<b>130</b>	<b>PEMERINTAH KABUPATEN</b>
130.01	Kebijakan Pemerintah Kabupaten
130.02	Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)
130.03	Monografi
130.1	Koodinasi
130.11	Satuan kerja Perangkat Daerah
130.12	Instansi Vertikal
130.13	Kerjasama Antar Daerah, dan Luar negeri ( <i>Sister city</i> )
131	Bupati , meliputi Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
132	Wakil Bupati, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
133	Sekretaris Daerah, meliputi Pencalonan, serah terima jabatan
134	Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah
134.1	Muspida
134.2	Forum PAN (Panitia Anggaran Nasional)
134.3	Forum Koordinasi Lainnya
134.4	Kerja sama antar Kabupaten
135	Pembentukan Daerah/Pemekaran Wilayah
135.1	Pemindahan Ibukota
135.2	Pembentukan wilayah Pembantu Bupati/Walikota
135.3	Pembagian wilayah Kabupaten
135.4	Perubahan Batas wilayah
135.5	Pemckaran Wilayah
135.6	Permasalahan batas Wilayah
135.7	Pembentukan Ibukota Kabupaten Pemberian dan Penggantian Nama Kabupaten, Daerah
135.8	Jalan
136	Pembagian wilayah
137	Penyerahan Urusan
138	Pemerintahan Wilayah Kecamatan
138.1	Sambutan/Pengarahan/Amanat
138.2	Pembentukan Kecamatan
138.3	Pemekaran Kecamatan
138.4	Perluasan / Perubahan batas wilayah Kecamatan
138.5	Pembentukan Perwakilan Kecamatan

159	Kunjungan Kerja / Study Banding / Konsultasi
<b>160</b>	-
<b>170</b>	<b>DPRD KABUPATEN</b>
171	Keanggotaan
171.1	Pencalonan
171.2	Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
171.3	Pelanggaran
171.4	Pemberhentian Antar Waktu
171.41	Meninggal Dunia
171.42	Mengundurkan Diri
171.43	Diberhentikan
171.5	Alat Kelengkapan Dewan
171.51	Pimpinan
171.52	Badan Musyawarah
171.53	Komisi
171.54	Badan Legislasi Daerah
171.55	Badan Anggaran
171.56	Badan kehormatan
171.57	Alat Kelengkapan Lain (Pansus)
172	Persidangan
172.1	Rapat-Rapat
172.11	Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa
172.12	Rapat Pimpinan DPRD
172.13	Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus
172.14	Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi
172.15	Rapat kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Pemandangan Umum
172.16	Rapat Fraksi
172.2	Fraksi
172.3	Tata Tertib
172.4	Kode Etik
172.5	Reses
172.6	Peninjauan / Kunjungan Lapangan
172.7	Kunjungan Kerja / Study Banding / Konsultasi
173	Kesejahteraan
173.1	Keuangan
173.2	Penghargaan
174	Hak
175	Sekretaris DPRD Kabupaten
<b>180</b>	<b>HUKUM</b>
180.1	Konstitusi
180.11	Dasar Negara
180.12	Undang-Undang Dasar
180.13	Undang-Undang
180.14	Peraturan Pemerintah

180.15	Keppres / Perpres / Inpres
180.16	Kepmen / Permen / Inmen
180.18	Perundangan Tingkat Kabupaten meliputi Perda, KepBup, PerBup
180.19	Perundangan Tingkat Desa meliputi Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa
180.2	Tap MPR
180.3	Konvensi
181	Perdata
181.1	Tanah
181.2	Rumah
181.3	Utang/Piutang
181.31	Gadai
181.32	Hipotik
181.4	Notariat
182	Pidana
182.1	Tindak Pidana Umum
182.2	Tindak Pidana Khusus
183	Peradilan
183.1	Jenis-jenis Peradilan
183.11	Peradilan Umum
183.111	Peradilan Negeri Tingkat Pertama
183.112	Peradilan Tinggi
183.113	Mahkamah Agung
183.12	Peradilan Agama Islam
183.121	Pengadilan Agama Islam Tingkat Pertama
183.122	Pengadilan Tinggi Agama Islam
183.123	Mahkamah Islam Agung
183.13	Peradilan Militer
183.131	Mahkamah Militer Tingkat Pertama
183.132	Mahkamah Militer Tinggi
183.133	Mahkamah Militer Agung
183.14	Peradilan Tata Usaha Negara
183.141	Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama
183.142	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
183.143	Mahkamah Tata Usaha Negara Agung
183.15	Peradilan Tindak Pidana Korupsi
183.16	Peradilan Hak Asasi Manusia
183.17	Mahkamah Konstitusi
183.18	Komisi Yudisial
183.19	<i>Ombudsmen</i>
183.2	Upaya Hukum
183.21	Banding
183.22	Kasasi

183.23	<i>Derden Verset</i>
183.24	Peninjauan Kembali
183.25	Grasi, Amnesti, Abolisi
183.3	Eksekusi
183.4	Pembinaan hukum, meliputi kadarkum
183.5	Bantuan Hukum, meliputi LBH
184	Hukum Internasional
185	Imigrasi
185.1	Visa
185.2	Paspor
185.3	<i>Exit</i>
185.4	<i>Reentry</i>
185.5	Lintas Batas/Batas Antar Negara
186	Kepenjaraan
186.1	Registrasi narapidana
186.2	Pembinaan narapidana
186.3	Pembebasan narapidana
186.4	Tahanan titipan
187	Kejaksaan
187.1	Penuntutan Umum
187.2	Penuntutan Khusus
189	Hukum Adat
189.1	Tokoh adat/Masyarakat
<b>190</b>	<b>HUBUNGAN LUAR NEGERI</b>
191	Perwakilan Asing
192	Tamu Negara
193	Kerjasama Diplomatik dengan Negara Asing
193.1	ASEAN
193.2	Bantuan Luar Negeri /Hibah
194	Perwakilan RI di Luar Negeri
195	PBB
196	Laporan Luar Negeri
197	Hutang Luar Negeri PHLN/LOAN
196	Laporan Luar Negeri
<b>200</b>	<b>POLITIK</b>
201	Perencanaan dan Program Pembinaan Politik Luar Negeri
201.1	Pembinaan dan Pemahaman Ideologi Negara
201.2	Kesatuan Bangsa
201.3	Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri termasuk laporannya
201.4	Keadaan Politik Luar Negeri
201.5	Evaluasi dan Pengawasan Pembinaan ipoleksosbud hankam
202	Orde Baru
203	Orde Reformasi
<b>210</b>	<b>KEPARTAIAN</b>
211	Partai Politik

211.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARPOL
211.2	Program Kerja, data Kegiatan PARPOL
211.3	Pembinaan PARPOL
211.4	Hasil Munas / Musda PARPOL
211.5	Sruktur/ Kepengurusan, Pengkaderan dan Keanggotaan PARPOL
211.6	Data inventaris dan keuangan PARPOL
212	Partai/Organisasi Terlarang
212.1	Keputusan Pembubaran partai/ organisasi terlarang
212.2	Daftar dan data pengurus anggota partai / organisasi terlarang
212.3	Ijin Meninggalkan tempat / domisili bagi anggota partai /organisasi terlarang
212.4	Daftar berkala mengenai Keadaan anggota partai/ organisasi terlarang
212.5	Laporan umum mengenai keadaan anggota partai/ organisasi terlarang
<b>220</b>	<b>ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>
221	Berdasarkan perjuangan
221.1	Perintis Kemerdekaan
221.2	Angkatan 45
221.3	Veteran
222	Berdasarkan Kekaryaan
222.1	PEBABRI
222.2	Wredatama
223	Berdasarkan Kerohanian
224	Lembaga Adat
225	Lembaga Kemasyarakatan
<b>230</b>	<b>ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL</b>
231	Ikatan Dokter Indonesia
231.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
231.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
231.3	Program kerja organisasi
231.4	Munas / Musda Kabupaten
232	Persatuan Guru Republik Indonesia
233	Persatuan sarjana Hukum Indonesia
234	Persatuan Advokat Indonesia
235	Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
236	Korps Pegawai Republik Indonesia
237	Persatuan Wartawan Indonesia
238	Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
239	Organisasi Profesi dan Fungsional Lainnya
<b>240</b>	<b>ORGANISASI PEMUDA</b>
241	Komite Nasional Pemuda Indonesia
242	Organisasi Mahasiswa
243	Organisasi Pelajar
244	Gerakan Pemuda Ansor
245	Gerakan Pemuda Islam Indonesia

246	Gerakan Pemuda Marhaenis
247	-
248	-
<b>250</b>	<b>ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN</b>
251	Federasi Buruh Seluruh Indonesia
252	Organisasi Buruh Internasional
253	Himpunan Kerukunan Tani
254	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
255	Himpunan Sopir Profesional Indonesia
256	-
257	-
258	-
<b>260</b>	<b>ORGANISASI WANITA</b>
261	Dharma Wanita
262	Persatuan Wanita Indonesia
263	Pemberdayaan Wanita
264	Kongres Wanita
265	-
266	-
267	-
268	-
<b>270</b>	<b>PEMILU (PEMILIHAN UMUM), PILKADA (PEMILIHAN KEPALA DAERAH)</b>
271	Pencalonan
272	Nomor Urut / Tanda Gambar
273	Kampanye
273.1	Dana Kampanye
274	Petugas Pemilu
275	Pemilih / Daftar Pemilih
276	Sarana
276.1	TPS
276.2	Kendaraan
276.3	Surat Suara
276.4	Kotak Suara
276.5	Dana
277	Pemungutan Suara / Penghitungan Suara
278	Hasil Pemilu
278.1	Penetapan terpilih dan pembagian kursi anggota legislatif
278.2	Penetapan pemenang pilkada
279	KPU / KPUD
<b>280</b>	<b>PENGAWASAN PEMILU / PILKADA</b>
281	Pemantauan
282	Pelanggaran
283	Sengketa
284	Panwaslu
<b>300</b>	<b>KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>



300.1	Kebijakan Pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan
300.2	Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan
300.3	Pencegahan dan penanggulangan gangguan /ancaman keamanan/ketertiban umum
300.4	Program kerja serta tata cara penanggulangan keamanan
301	Keamanan
302	Ketertiban
303	Penegakan pelaksanaan perda
304	Pembinaan / Penyuluhan Pelanggaran Perda
305	Patroli Wilayah
306	Laporan Kunjungan VIP, VVIP, tamu asing
306.1	Pengamanan
306.2	Pengawasan
307	Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan
<b>310</b>	<b>PERTAHANAN</b>
311	Darat
312	Laut
313	Udara
314	Ketahanan Bangsa
315	Ketahanan Ekonomi
316	Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
<b>320</b>	<b>KEMELITERAN/TNI</b>
321	Latihan Militer
322	Wajib militer
323	Operasi militer
324	Kekaryaannya TNI
325	Kemanunggalan TNI dengan rakyat
<b>330</b>	<b>KEAMANAN</b>
331	Kepolisian
331.1	Polisi Pamong Praja
331.2	Kamra
331.3	Kamling
331.4	Jaga Wana
332	Huru hara/Demonstrasi
333	Senjata Api/Tajam
334	Bahan Peledak
335	Perjudian
336	Surat-surat kaleng
337	Pengaduan Masyarakat
338	Himbauan/Larangan
339	Teroris
<b>340</b>	<b>PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)</b>
340.1	Kebijaksanaan Pemerintah mengenai pembentukan Linmas
341	Pembinaan dan Diklat
341.1	Pengangkatan/Pemberhentian Anggota Linmas

341.2	Pendidikan/Latihan Linmas
341.3	Latihan PAM swakarsa
341.4	Pendidikan/Latihan MENWA
342	Pengerahan dan Pengendalian Linmas
343	Kesejahteraan bagi anggota Linmas
343.1	Pemberian tali asih bagi anggota Linmas
343.2	Bantuan modal usaha bagi anggota Linmas
343.3	Santunan Uang duka bagi anggota Linmas
343.4	Penghargaan bagi anggota Linmas
344	Data Linmas, MENWA, PAM Swakarsa
344.1	Linmas Lanjut Usia
345	Orientasi kesadaran Bela Negara
346	Kegiatan Pelaksanaan Linmas
<b>350</b>	<b>KEJAHATAN</b>
351	Makar/Pemberontakan/Terrorisme
352	Pembunuhan
353	Penganiyaan/Pencurian/Perampasan
354	Subversi/Penyeludupan/Narkotika
355	Penipuan dan pemalsuan
356	Korupsi/Penyelewengan/Penyalahgunaan Jabatan
357	Kekerasan pada perempuan dan anak
357.1	Pelaporan
357.2	Penanganan Korban
358	Kenakalan
359	Kejahatan Lainnya ( <i>Traficking</i> , hipnotis, dll)
<b>360</b>	<b>BENCANA</b>
360.1	Pelatihan
360.2	Surat Keputusan
360.3	Berita Acara
361	Gunung Merapi/Gempa/Tsunami
362	Banjir/Tanah longsor
363	Angin Topan
364	Kebakaran
364.1	Pemadam Kebakaran
365	Kekeringan
366	Tsunami
367	Koordinasi/unsur pengarah Penanggulangan Bencana
368	MOU Pemerintah Pusat BNPB
<b>370</b>	<b>KECELAKAAN</b>
371	Darat
372	Udara
373	Laut
374	Sungai
375	Pelatihan Kemampuan pusdalop bagi aparat PBP
376	Latihan keterampilan pemadam kebakaran
377	Kecelakaan Darat, Laut, Udara

378	Investigasi/Penyelidikan kecelakaan
379	Asuransi kecelakaan
<b>380</b>	<b>PENDAMPINGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI</b>
381	Perencanaan
381.1	Perencanaan Teknis
381.2	Rekomendasi
382	Bantuan Bencana
383	Penanggulangan Bencana dengan pihak lain
384	Sarana prasara rehabilitasi dan rekonstruksi
385	PUSDALOPS
386	Kunjungan lapangan
387	Relawan
388	Laporan bencana
<b>390</b>	<b>KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN</b>
391	Instansi pemerintah pusat
392	Instansi pemerintah di daerah
393	Lembaga International
394	Lembaga non pemerintah nasional
<b>400</b>	<b>KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>
401	Kebijakan dan program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat
402	PNPM Mandiri Pedesaan
<b>410</b>	<b>BANGUNAN DESA/KELURAHAN</b>
411	Gotong royong
411.1	Swadaya Gotong royong
411.11	Pembinaan
411.12	Gotong Royong Dinamis
411.13	Gotong Royong Statis
411.14	Pungutan
411.2	Lembaga Sosial Desa (LSD)
411.21	Pembinaan
411.22	Klasifikasi
411.23	Proyek
411.24	Musyawarah
411.3	Latihan kerja Masyarakat
411.31	Kader Masyarakat
411.32	Kuliah Kerja Nyata
411.33	Pusat Latihan
411.34	Kursus-Kursus
411.35	Pusat Latihan
411.36	Keterampilam
411.37	Pramuka
411.4	Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK)
411.41	Program
411.42	Pembinaan Organisasi
411.43	Kegiatan
411.5	Penyuluhan Masyarakat Desa
411.51	Publikasi
411.52	Peragaan

411.53	Sosio Drama
411.54	Siaran Pedesaan
411.55	Penyuluhan Lapangan
411.6	Kelembagaan Dcsa
411.61	Kelompok Tani
411.62	Rukun Tani
411.63	Subak
611.64	Dharma Tirta
411.7	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
412	Perekonomian Desa
412.1	Produksi Desa
412.11	Pengolahan
412.12	Pemasaran
412.2	Pembiayaan Pembangunan Desa
412.21	Inventarisasi Data
412.22	Petunjuk/Pembinaan Pelaksanaan
412.23	Pelaksanaan dan Perkembangan Pembangunan
412.24	Bantuan/Stimulasi
412.25	Perkreditan Desa
412.26	Pelaporan
412.27	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)
412.3	Koperasi Desa
412.31	Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
412.32	Koperasi Unit Desa (KUD)
413	Sarana dan Prasarana Desa
413.1	Pemukiman Kembali penduduk
413.2	Pemugaran perumahan dan lingkungan Desa
413.3	Perbaikan kampung
413.4	Teknologi Tepat Guna (TTG)
414	Pengembangan Dcsa
414.1	Tingkat Perkembangan Desa
414.11	Jumlah Desa
414.12	Pemekaran Desa
414.13	Pembentukan Desa Baru
414.14	Evaluasi
414.15	Bagan
414.2	Unit Kerja Pembangunan Desa
414.21	Penyuluhan Program
414.22	Lokasi UDKP
414.23	Pelaksanaan
414.24	Bimbingan Pembinaan
414.25	Evaluasi
414.3	Tata Desa
414.31	Inventarisasi
414.32	Penyusunan Pola Tata Desa
414.33	Aplikasi Tata Desa
414.34	Pemetaan

424	Tenaga Pengajar (Guru, Dosen, guru/dosen teladan, guru/dosen berprestasi)
424.1	Pertukaran Guru ke Luar Negeri
424.2	Sertifikasi Guru
425	Sarana Pendidikan
425.1	Bangunan Pendidikan
425.11	Gedung Sekolah
425.12	Kampus
425.13	Pusat Kegiatan
425.14	Perpustakaan
425.15	Laboratorium
425.2	Buku
425.3	Perlengkapan Pendidikan
425.4	Sistem Informasi Pendidikan
425.5	Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan
<b>426</b>	<b>KEOLAHRAGAAN</b>
426.1	Cabang Olahraga
426.2	Sarana
426.21	Gedung Olahraga
426.22	Stadion
426.23	Lapangan
426.24	Kolam Renang
426.3	Pesta Olahraga (PON, Porsade, Olimpiade)
426.4	KONI
<b>427</b>	<b>KEPEMUDAAN</b>
427.1	Pertukaran Pemuda
427.2	Paskibraka
427.3	Sarana Prasarana Kepemudaan, meliputi sarana kegiatan remaja : gelanggang remaja
427.4	Kemitraan Pemuda
427.5	Karang Taruna
428	Kepramukaan/Kepanduan
<b>430</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>
430.1	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kebudayaan
430.2	Pembinaan bidang kebudayaan
431	Kesenian
431.1	Cabang Kesenian (Seni Pewayangan, seni tari, seni musik, seni rupa, seni lukis dll)
431.2	Sarana
431.21	Gedung Kesenian
431.22	Padepokan
431.23	Lembaga Adat
431.24	Kegiatan adat/tradisi
431.3	Usaha pertunjukan, hiburan, kesenangan : Festival , pentas seni

432	Kepurbakalaan
432.1	Museum
432.2	Peninggalan Kuno
432.21	Candi, termasuk pemugaran
432.22	Benda
433	Sejarah
434	Bahasa
435	Penghayat Kepercayaan
436	Kepercayaan
<b>440</b>	<b>KESEHATAN</b>
440.1	Kebijakan dan program pemerintah untuk kesehatan
441	Pembinaan Kesehatan
441.1	Gigi
441.2	Mata
441.3	Jiwa
441.4	Kanker
441.5	UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
441.6	Perawatan
441.7	Kesehatan Masyarakat meliputi PKM, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat melalui media PKK, Posyandu, dsb
441.8	Pekan Imunisasi Nasional
441.9	JPSBK (Jaminan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan)
441.91	JAMKESMAS
441.92	JAMKESDA
441.93	JAMPERSAL
441.94	Jaminan lainnya
442	Obat-obatan
442.1	Pengadaan
442.2	Pemeriksaan Obat
442.3	Penyimpanan Obat
442.4	Distribusi obat
442.5	Pengawasan Obat
442.51	Obat Generik
442.52	Obat Terlarang
442.53	Pemalsuan Obat
443	Penyakit Menular
443.1	Pencegahan Penyakit
443.2	Pemberantasan Penyakit Menular langsung (P.2.M.L)
443.21	Kusta
443.22	Kelamin, HIV, HIDS, IMS
443.23	Frambusia
443.24	T.B.C
443.25	Kolera
443.26	SARS, dan jenis penyakit lainnya
443.3	Epidemiology dan Karantina (Epidka)
443.31	Kholera

443.32	Imunisasi
443.33	Surveilanse
443.4	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)
443.41	Malaria
443.42	<i>Dengue Heemorrhagie Fever</i> (DHF)
443.43	Filaria
443.44	Serangga
443.45	Rabies
443.46	Antrak
443.47	Leptosirosis
443.48	Chikungunya
443.49	Penyakit lainnya
443.5	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular
443.51	A. Pektoris
443.52	IMA (Irama Mastcmik Akut)
443.53	Hipertensi
443.54	Stroke
443.55	Diabetes Melitus
443.56	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA.Serviks
443.57	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA.Mammae
443.58	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA.Hepar
443.59	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA.Paru, Dan Penyakit Lainnya
443.5	Higiene sanitasi
443.51	Tempat-tempat pembuatan dan penjualan makanan minuman (TPPMM), jasa boga
443.52	Sarana air minum
443.53	Pestisida, insektisida
443.54	Pencemaran
443.55	Jamban keluarga, Sanitasi rumah tangga
443.56	Kesehatan institusi, Misal : Poskestren, Sanitasi masjid dll
443.57	Higiene sanitasi CA. Mammae
443.58	Higiene sanitasi CA. Hepar
443.59	Higiene sanitasi CA. Paru
443.7	Kejadian khusus
443.71	Dekopensatiokordosis (Serangan jantung)
443.72	Asma
443.73	Psikosis
443,74	PPOM
443.75	Kecelakaan Lalu Lintas
443.76	Kejadian Luar Biasa (KLB)
444	Gizi dan Pengawasan Makanan
444.1	Kekurangan Makanan
444.2	Bahaya kelaparan, busung lapar ,gizi busuk
444.3	Keracunan Makanan

444.4	Menu makanan rakyat
444.5	Gondok endemic (GAKI)
445	Keliling, Poliklinik
445.1	Pelayanan Medis (Termasuk surat keterangan berkaitan dengan kondisis pasien, visum)
445.11	Rawat Inap
445.12	Rawat Jalan
445.13	IGD
445.14	IBS
445.15	ICU
445.16	MCU ( <i>Medical Check Up</i> )
445.2	Penunjang Medis
445.21	Farmasi
445.22	Rekam Medik
445.23	Radiologi
445.24	Gizi
445.25	Laboratorium Klinik
445.26	Laboratorium Patologi Anatomi, Forensik
445.27	Bank Daerah Rumah Sakit
445.28	Sanitasi Rumah Sakit
445.29	CSSD / Laundry
445.3	Keperawatan
445.4	Komite Medik
445.5	SPI (Satuan Pengawas Internal)
445.6	Mutu Rumah Sakit
445.61	Akreditasi
445.62	ISO
445.63	PSBH ( <i>Problem Solving For Better Hospital</i> )
445.64	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
445.7	IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah)
445.8	Promosi Layanan Kesehatan
445.9	Kasus Hukum Rumah Sakit
446	Tenaga Medis
446.1	Perencanaan Tenaga Medis
446.2	Pendayagunaan Tenaga Medis
446.21	Perijinan Untuk Tenaga Medis
446.22	Kegiatan Bhakti Sosial Tenaga Medis
446.23	TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia)
446.3	Diklat Tenaga Kesehatan / Medis
446.4	Diklat Tenaga Kesehatan / Para Medis
446.5	Pendidikan di Bidang Kesehatan Termasuk Pendidikan Spesialis
447	Peralatan Kesehatan
447.1	Standarisasi
447.2	Penyimpanan
447.3	Distribusi
447.4	Perijinan Berkaitan Dengan Alat Kesehatan



448	Pengobatan Alternatif
448.1	Pijat
448.2	Akupunktur
448.3	Jamu dan Herbal
448.4	Dukun
449	Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan
449.1	PUSKESMAS dan PUSKESMAS Keliling
449.2	Poliklinik dan Balai Kesehatan
449.3	Rumah Bersalin
449.4	Posyandu
449.5	Laboratorium Kesehatan
449.6	Apotik
449.7	Sanatorium Kesehatan
<b>450</b>	<b>AGAMA</b>
450.1	Kebijakan dan Program Pemerintah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Bidang Keagamaan
450.2	Bantuan dibidang Keagamaan
451	Islam
451.1	Peribadatan
451.11	Sholat
451.12	Zakat, Infaq, Shodaqoh
451.13	Puasa
451.14	Umroh dan Haji
451.2	Rumah Ibadah (Masjid, Musholla, Surau)
451.3	Tokoh Agama
451.4	Pendidikan Agama
451.41	Pendidikan Tinggi Agama
451.42	Menengah , MTs, MA
451.43	Dasar, Pra Sekolah, MI
451.44	Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ/Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dll)
451.45	Sarana Pendidikan Meliputi Buku, Gedung Sekolah dll
451.46	Tenaga Pengajar
451.47	Dakwah (Pengajian, MTQ), Buku
451.5	Wakaf
451.6	Peradilan
451.7	Organisasi Keagamaan bukan politik (Majelis Ulama Indonesia, Dewan Hisab Rukyat dll)
451.8	Mazhab Agama Islam
452	Kristen Protestan
452.1	Peribadatan
452.2	Rumah Ibadah Gereja dll
452.3	Tokoh Agama, Rohaniawan (Pendeta, Domine dll)
452.4	Mazhab Agama Kristen Protestan
452.5	Organisasi Gerejani
453	Khatolik

453.1	Peribadatan
453.2	Rumah Ibadah Gereja dll
453.3	Tokoh Agama, Rohaniawan
453.4	Mazhab Agama Khatolik
453.5	Organisasi Gerejani
454	Hindu
454.1	Peribadatan
454.2	Rumah Ibadah Pura dll
454.3	Tokoh Agama, Rohaniawan
454.4	Mazhab Agama Hindu
454.5	Organisasi Agama Hindu
455	Budha
455.1	Peribadatan
455.2	Rumah Ibadah Candi, Vihara dll
455.3	Tokoh Agama, Rohaniawan
455.4	Mazhab Agama Budha
455.5	Organisasi Agama Budha
456	Kong Hu Cu
456.1	Peribadatan
456.2	Rumah Ibadah Klenteng dll
456.3	Tokoh Agama, Rohaniawan
456.4	Mazhab Agama Kong Hu Cu
456.5	Organisasi Agama Kong Hu Cu
457	Urusan Haji
457.1	ONH
457.2	Manasik
458	-
459	-
	-
<b>460</b>	<b>SOSIAL</b>
461	Rehabilitasi penyandang Cacat
461.1	Cacat Ganda
461.2	Cacat Fisik
461.3	Cacat Mental
462	Rehabilitasi Sosial
462.1	Gelandangan/orang terlantar, anak jalanan
462.2	Pengemis
462.3	Tuna susila
462.4	Anak nakal
462.5	Tuna wisma
463	Kesejahteraan anak dan keluarga
463.1	Kesejahteraan Anak
463.11	Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA)
463.12	Perlindungan Anak
463.13	Anak Asuh
463.2	Kualitas Hidup Perempuan
463.21	Perlindungan Perempuan

463.22	Ibu Teladan
463.23	Pengarusutamaan Gender (PUG)
464	Keperintisan dan Kepahlawanan
464.1	Pahlawan meliputi Penghargaan kepada Pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan jandanya
464.2	Perintis kemerdekaan meliputi Pembinaan, penghargaan dan tunjangan kepada Perintis Kemerdekaan
464.3	Cacat Veteran
465	Kesejahteraan Sosial
465.1	Lanjut Usia
465.2	Korban kekacauan, pengungsian, rehabilitasi
465.3	Masyarakat miskin: Raskin, BLT dll
466	Sumbangan sosial
466.1	Korban bencana
466.2	Pencarian Dana untuk Sumbangan Meliputi Penyelenggaraan Undian, Bazar dsb
466.4	Panti Asuhan
466.5	Panti Jompo
466.11	Jaminan sosial
467	Bimbingan sosial
467.1	Masyarakat suku terasing meliputi : bimbingan pendidikan, kesehatan, pemukiman, Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) dan sebagainya
468	PMI
469	Makam
469.1	Umum
469.2	Pahlawan
469.3	Khusus, Keluarga, Raja
469.4	Krematorium
<b>470</b>	<b>KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>
470.1	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kependudukan
471	Pendaftaran Penduduk
471.1	Identitas Penduduk
471.11	Biodata
471.12	Nomor Induk Kependudukan
471.13	Kartu Tanda Penduduk
471.14	Kartu Keluarga
471.15	Advokasi Identitas Penduduk
471.2	Perpindahan Penduduk dalam wilayah Indonesia
471.21	Perpindahan Penduduk WNI
471.22	Perpindahan Penduduk WNA dalam wilayah Indonesia
471.23	Perpindahan Penduduk WNA dan WNI tinggal sementara
471.24	Daerah Terbelakang
471.25	Bedol Desa
471.3	Perpindahan Penduduk Antar Negara
471.31	Penduduk Indonesia Ke Luar Negeri
471.32	Orang asing tinggal sementara

471.33	Orang asing tinggal tetap
471.34	Perpindahan penduduk antar Negara diwilayah perbatasan antar negara (pelintas batas tradisional)
471.4	Pendaftaran pengungsi dan penduduk rentan
471.41	Akibat bencana alam
471.42	Akibat kerusuhan sosial
471.43	Pendaftaran penduduk daerah terbelakang
471.44	Pendaftaran penduduk rentan
472	Pencatatan Sipil
472.1	Kelahiran kematian dan advokasi
472.11	Kelahiran
472.12	Kematian
472.13	Advokasi
472.2	Perkawinan, perceraian dan advokasi
472.21	Perkawinan Agama Islam
472.22	Perkawinan Agama non Islam
472.23	Perceraian Agama Islam
472.24	Perceraian Agama non Islam
472.25	Advokasi
472.3	Pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta dan advokasi
472.31	Pengangkatan anak
472.32	Pengakuan anak
472.33	Pengesahan anak
472.34	Perubahan akta
472.35	Pembatalan akta
472.36	Advokasi
472.4	Pencatatan Kewarganegaraan
472.41	Akibat perkawinan
472.42	Akibat kelahiran
472.43	Non Perkawinan/Non kelahiran
472.44	Naturalisasi
472.45	Perubahan WNI ke WNA
473	Informasi Kependudukan
473.1	Teknologi Informasi
473.2	Pengolahan Data Kependudukan
473.21	Pendaftaran Penduduk
473.22	Kejadian vital penduduk
473.23	Penduduk non registrasi
473.3	Pelayanan informasi kependudukan
474	Perkembangan penduduk
474.1	Pengarahannya Kuantitas Penduduk
474.11	Struktur Jumlah
474.12	Komposisi
474.13	Fertilitas
474.14	Kesehatan Reproduksi

474.15	Morbiditas Penduduk
474.16	Mortalitas Penduduk
474.2	Pengembangan Kuantitas Penduduk
474.21	Anak dan remaja
474.22	Penduduk usia produktif
474.23	Penduduk lanjut usia
474.24	Gender
474.3	Penataan Persebaran Penduduk
474.31	Migrasi antar wilayah
474.32	Migrasi Internasional
474.33	Urbanisasi
474.34	Sementara
474.35	Migrasi non Permanen
474.4	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
474.41	Pengembangan Sistem Perlindungan Penduduk
474.42	Pelayanan Kelmbagaan Ekonomi
474.43	Pelayanan Kelembagaan Sosial Budaya
474.44	Partisipasi Masyarakat
474.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan
474.51	Pendidikan Jalur Sekolah
474.52	Pendidikan Jalur Luar Sekolah
474.53	Pendidikan Jalur Masyarakat
474.54	Pembangunan Berwawasan Kependudukan
<b>475</b>	<b>TRANSMIGRASI</b>
475.1	Penyiapan informasi daerah transmigrasi
475.11	Informasi potensi peluang bekerja dan berusaha didaerah transmigrasi
475.12	Perbandingan potensi daerah asal dan daerah transmigrasi
475.13	Permasyarakatan/sosialisasi transmigrasi
475.14	Peran serta lembaga dan instansi terkait serta media massa dalam penyampaian informasi transmigrasi
475.15	Publikasi transmigrasi melalui pameran dan kesenian
475.16	Bimbingan dan penyuluhan transmigrasi bagi masyarakat daerah asal dan daerah transmigrasi
475.17	Kerjasama dibidang transmigrasi
475.18	Kepulangan transmigrasi karena daerah terjadi konflik
475.2	Pemukiman transmigrasi
475.21	Penggunaan tanah pemukiman transmigrasi
475.22	Pengembangan, struktur wilayah dan analisis data wilayah transmigrasi
475.23	Tata ruang satuan kawasan pengembangan, study kelayakan dan dampak lingkungan transmigrasi
475.24	Teknis ruang satuan pemukiman dan lokasi/peta informasi pemukiman
475.25	Standarisasi dan spesifikasi teknis rumah transmigrasi, fasilitas umum/sosial dan jaringan transportasi

475.26	Tanah pemukiman, pengadaan areal tanah dan pembebasannya, identifikasi, pengukuran dan pembuatan batas areal tanah
475.27	Penyelesaian masalah tanah di lokasi pemukiman transmigrasi
475.28	Tata ruang pemukiman transmigrasi
475.281	Rancangan dan pemanfaatan areal tanah
475.282	Rancangan kapling TSM
475.283	Pengukuran dan pembagian lahan pekarangan, lahan usaha dan fasilitas umum
475.284	Penyelesaian kekurangan lahan usaha kepada transmigran dan sengketa tanah
475.285	Inventarisasi penataan kembali dan penggunaan areal tanah
475.286	Pengukuran batas unit pemukiman
475.287	Penyelesaian perubahan areal dan urusan perijinan pemanfaatan areal tanah
475.29	Sarana pemukiman transmigrasi
475.291	Pembinaan dan pengadiln, penyiapan bangunan rumah transmigran dan jamban keluarga dan fasilitas umum
475.292	Pembinaan dan pengendalian penyiapan sarana air bersih
475.293	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sumber energi
475.294	Pembinaan dan pengendalian peningkatan sarana
475.295	Pembinaan , pengendalian dan teknis peningkatan potensi lahan dan lingkungan
475.3	Pengerahan, pemindahan dan penempatan
475.31	Pengkajian dan pengembangan metode pengerahan dan penempatan
475.32	Teknis penyuluhan dan motivasi dalam pengerahan dan penempatan
475.33	Pengerahan
475.331	Pendaftaran dan seleksi calon transmigran
475.332	Berkas persyaratan dan administrasi calon transmigran
475.333	Transmigran yang dinyatakan lulus penyaringan
475.34	Pemberangkatan transmigran
475.341	Pengangkutan transmigran melalui laut, udara, dan darat
475.342	Jadwal dan tempat pelaksanaan pemberangkatan
475.343	Pelaksanaan pengurusan pemberangkatan
475.344	Pengawalan perjalanan transmigran
475.345	Pengaturan rute pemberangkatan
475.346	Alokasi penempatan dan surat perintah pemberangkatan
475.35	Penempatan transmigran
475.351	Kesiapan lokasi dan daya tampung
475.352	Pendataan transmigran di lokasi yang masih dibina
475.353	Data transmigran yang meninggalkan lokasi di setiap UPT
475.354	Pemantauan penempatan transmigrasi pengganti
475.4	Penampungan transmigrasi (transito), dan pelatihan Transmigran
475.41	Pelatihan transmigran

475.411	Program pengajaran dan metode pelatihan
475.412	Penyusunan silabus dan modul pelatihan
475.413	Penyusunan calon peserta/pelatih
475.42	Penampungan transmigran di transito
475.421	Pelayanan kesehatan bagi transmigran
475.422	Pelayanan makanan bagi transmigran
475.423	Pelayanan pembekalan/peralatan bagi transmigran
475.5	Pembinaan masyarakat transmigrasi
475.51	Identifikasi dan penjajagan pembinaan
475.511	Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap penyesuaian
475.512	Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pengembangan
475.513	Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pembinaan
475.52	Pembinaan Pendidikan
475.521	Penyediaan/penyiapan sarana dan usaha pengembangan pendidikan
475.522	Pelaksanaan penyiapan tenaga pendidikan dan status
475.53	Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat
475.54	Pembinaan kesehatan
475.541	Penyediaan sarana kesehatan dan KB
475.542	Penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa
475.543	Pendistribusian bantuan pangan
475.55	Pembinaan rokhani
475.551	Bimbingan mental spiritual dan penyediaan petugas agama
475.552	Bimbingan adaptasi masyarakat
475.553	Bimbingan pelaksanaan penumbuhan interaksi sosial
475.56	Pelayanan pos di daerah transmigrasi
475.57	Penyerahan UPT yang layak untuk diserahkan
475.58	Penilaian transmigran teladan
475.59	Pemantauan dan penilaian kelayakan usaha
<b>476</b>	<b>KELUARGA BERENCANA</b>
476.1	Alat Kontrasepsi
476.2	Pelayanan KB meliputi KB Lestari, KB Mandiri
476.3	Penyuluh Lapangan KB (PLKB)
476.4	Pos KB desa
476.5	Akseptor KB
<b>480</b>	<b>MEDIA MASSA</b>
480.1	Kebijakan dan program Pemerintah dalam bidang media massa
	Media cetak meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran
481	Penerbitan
481.1	Surat kabar
481.2	Majalah
481.3	Buku
481.4	Penerjemahan

481.5	<i>Press Release, Klarifikasi Berita, Press Statistik</i>
481.51	Perindustrian Perdagangan termasuk 9 harga pokok
481.52	Perekonomian dan Perbankan
481.53	Bidang lainnya
481.6	Layanan informasi/ <i>Leaflet</i>
481.7	Masukan Analisis Bupati
482	Media Elektronik meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran
482.1	Radio
482.3	Film Dokumenter
482.4	Pengawasan Lembaga Penyiaran
482.5	Kelompok Pemantau Isi Siaran
482.6	Pengkajian Isi Siaran
482.7	SDM Penyiaran
483	Televisi
484	Film
485	Pers
485.1	Kewartawanan
485.2	Wawancara
485.3	Informasi Nasinal
486	Grafika
487	Penerangan
488	<i>Operation Room</i>
489	Hubungan Masyarakat
<b>500</b>	<b>PEREKONOMIAN</b>
500.1	Dewan stabilitasi
501	Pengadaan Pangan
502	Pengadaan Sandang
503	Perizinan pada umumnya. Untuk perizinan sesuai Bidang, Klasifikasi pada masalahnya
<b>510</b>	<b>PERDAGANGAN</b>
510.1	Promosi perdagangan
510.11	Pekan raya
510.12	Iklan
510.13	Pameran
510.14	Event-event
510.15	Lomba-lomba (lomba desain, busana, kerajinan)
510.2	Pelelangan, distribusi
510.21	Pemasaran Sembako
510.22	Pemasaran hasil industri
510.23	Penentuan harga pokok
510.3	Bina usaha dan sarana Perdagangan
510.31	Renana dan program Kerja
510.32	Pelaksanaan Pelayanan administrasi
510.33	Pelaksanaan Teknis
510.34	Pemantauan



510.35	Evaluasi dan Pelaporan
510.4	Perijinan (HO, Gangguan, Reklame, dll)
510.41	Penerbitan SIUP
510.42	Perpanjangan
510.43	Ijin prinsip
510.44	Rekomendasi
510.5	Perdagangan antar pulau
510.51	Kerjasama bahan baku
510.52	Industri pemasaran
510.53	Kontrak
510.6	T e r a
510.61	Tera dan Tera ulang
510.62	Takaran
510.63	Timbangan dan anak Timbangan
510.64	Kalibrasi
510.65	Cap tanda tera
510.66	Biaya tera
510.7	Bantuan Peralatan
510.71	Proposal
510.72	Surat Perjanjian / Kontrak
510.73	Serah Terima
510.8	Perijinan / Rekomendasi Tanda Pabrik
510.9	Kemetrologian
510.91	Standart Tingkat Tiga
510.92	Standart Kerja Satuan Ukuran
510.93	Ukuran Metrologi
510.931	Peralatan
510.932	Laboratorium Metrologi Legal
510.933	Tanki Ukur Mobil
510.934	Meter Taxi
510.935	KWH Meter termasuk didalamnya listrik dan PDAM
510.936	S P B U
511	Pemasaran
511.1	Sembilan bahan pokok diantaranya beras, garam, minyak tanah, minyak goreng, sabun dll
511.2	Pasar
511.3	Pertokoan, kaki lima, kios
511.4	Pusat perbelanjaan
512	Ekspor
512.1	Ekspor Hasil Industri
512.2	Ijin Ekspor
512.3	Pengembangan Pasar Luar Negeri
512.4	Managemen Perdagangan Internasional
512.5	Eksport Hasil Industri
512.51	Kebijakan
512.52	Pemasaran

512.6	Pemberitahuan Eksport Barang
512.7	Pengawasan Mutu Barang
512.8	Eksportir Terdaftar
512.9	Evaluasi dan pelaporan
513	Impor
513.1	Ijin Impor
513.11	Pemberian ijin
513.12	Pengendalian ijin
513.2	Standart Mata Dagang Import
513.3	Management Perdagangan Internasional
513.4	Kegiatan Import
513.41	Pembinaan Import
513.42	Pengendalian Import
513.43	Pemantauan Import
513.5	Faktor-faktor Pendukung
513.6	Pengawasan mutu Barang Import
513.7	Penyaluran Kegiatan Import
513.71	Bahan Konsumsi
513.72	Bahan Baku
513.73	Bahan Penolong
513.8	Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Import
514	Perdagangan Antar Pulau
514.1	Kerjasama Bahan baku
514.2	Industri Pemasaran
514.3	Kontrak
515	Pengembangan Pontesi Perdagangan Luar Negeri
515.1	Promosi dan Informasi
515.2	Pameran
515.3	Kerjasama
516	Pergudangan, termasuk tangki penyimpanan minyak goreng
516.1	Peti kemas
516.2	Tangki Penyimpanan
517	Aneka Usaha Perdagangan
<b>518</b>	<b>KOPERASI</b>
518.1	Bina Usaha Koperasi
518.11	Koperasi Pertanian
518.12	Koperasi Non Pertanian
518.13	Permodalan Koperasi
518.131	Pemupukan Modal
518.132	Pemanfaatan Modal
518.133	Perbankan dan Asuransi
518.134	Permodalan Luar Koperasi
518.135	Kredit Program Umum
518.136	Kredit Program Khusus
518.14	Distribusi dan Jasa Koperasi
518.141	Distribusi Bahan Pokok

518.142	Distribusi Aneka Bahan
518.143	Distribusi Kerjasama Niaga
518.144	Jasa Angkutan
518.145	Jasa Perumahan
518.146	Aneka Jasa
518.15	Koperasi Kelistrikan, Industri dan Telekomunikasi
518.2	Bina Lembaga Koperasi
518.21	Organisasi Koperasi
518.211	Anggaran Dasar dan Akte Pendirian Koperasi
518.212	Pemberian Badan Hukum Koperasi
518.213	Penyelesaian Pembubaran Koperasi
518.214	Keragaan Koperasi
518.215	Pengakuan Koperasi Sekolah
518.216	Amalgamasi
518.217	Tertib Organisasi Koperasi
518.218	Penyelesaian Penyelisihan/ Persengketaan
518.219	Bimbingan Kesadaran Hukum
518.22	Bina Hubungan Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi
518.221	Rapat Anggota Tahunan Koperasi
518.222	Pengurus dan Badan Pemeriksa
518.223	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)
518.224	Badan Penasehat dan Pertimbangan Koperasi Unit Desa (BPP KUD)
518.23	Bina Tata Laksana Koperasi
518.231	Klasifikasi Koperasi Pedesaan
518.232	Klasifikasi Koperasi Perkotaan
518.233	Klasifikasi Koperasi Sekunder
518.24	Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi
518.241	Administrasi Koperasi Pedesaan
518.242	Administrasi Koperasi Perkotaan
518.243	Karyawan/ Maneger Koperasi
518.244	Sumber Daya Manusia
518.245	Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST)
518.246	Penyaluran Alat Sekolah
518.247	Bantuan Pemda Kepada Koperasi/KUD
518.25	Akuntansi
518.251	Akuntansi Koperasi Pedesaan
518.252	Akuntansi Koperasi Perkotaan
518.253	Akuntansi Koperasi Sekunder
518.26	Pengawasan Koperasi
518.261	Pengawasan Koperasi Primer
518.262	Pengawasan Koperasi Sekunder
518.263	Koperasi Jasa Audit
518.264	Kerjasama Kantor Akuntansi
518.27	Penyuluhan Koperasi
581.271	Pembinaan Kader Koperasi

518.272	Masyarakat Umum
518.273	Forum Komunikasi
518.274	Kelompok Tani
518.275	Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PKKL)
518.276	Penilaian Tingkat Nasional
518.3	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
518.31	Pembinaan Usaha
518.311	Pembinaan Usaha Mikro
518.312	Pembinaan Usaha Kecil
518.313	Pembinaan Usaha Menengah
518.32	Pengawasan Usaha
518.321	Pengawasan Usaha Mikro
518.322	Pengawasan Usaha Kecil
518.323	Pengawasan Usaha Menengah
<b>520</b>	<b>PERTANIAN</b>
521	Tanaman Pangan
521.1	Rencana dan Program
521.11	Bimas/ Inmas Termasuk Kredit
521.12	Pelaporan dan Evaluasi Pertanian
521.2	Produksi
521.21	Padi
521.22	Palawija
521.23	Hortikultura (Sayuran, Buah-Buahan, Tanaman Hias)
521.3	Sarana Usaha Pertanian
521.31	Peralatan Meliputi Traktor dan Sebagainya
521.33	Pembenihan dan Pembibitan
521.34	Pupuk
521.35	Irigasi Pertanian
521.36	Rehabilitasi Lahan Pertanian
521.4	Perlindungan Tanaman
521.41	Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pangan
521.411	Penyakit Tanaman Pangan
521.412	Hama Tanaman Pangan
521.42	Pemberantas
521.421	Pestisida
521.422	Agensia Pengendalian Hayati
521.43	Tanah Pertanian Pangan
521.431	Persawahan
521.432	Perladangan
521.433	Kebun
521.5	Tanah Pertanian Pangan
521.51	Persawahan
521.52	Perladangan
521.53	Kebun
521.54	Rumpun Ikan Laut
521.55	KTA/Lahan Kritis

521.6	Pengusaha Petani
521.7	Bina Usaha
521.71	Pasca Panen
521.72	Pemasaran dan Promosi Pertanian
521.8	Pengembangan Sumber Daya Pertanian
<b>523</b>	<b>PERIKANAN DAN KELAUTAN</b>
523.1	Rencana, Program, Stastistik, Prospek dan Pelaporan Bidang Perikanan dan Kelautan
523.11	Penyuluhan
523.12	Teknologi
523.2	Produksi Perikanan
523.21	Standarisasi Mutu Hasil Perikanan
523.22	Perikanan Budidaya: CBIB, CBIC
523.23	Sertifikasi Kesehatan ikan
523.3	Usaha Perikanan
523.31	Pembibitan
523.32	Daerah Penangkapan Pertambakan meliputi : (tambak Ikan Air Deras, Tambak Udang dll)
523.33	Fasilitas Perijinan : SIUP, SIPI , SKP
523.34	Jaring Terapung
523.4	Sarana
523.41	Peralatan
523.42	Kapal
523.43	Pelabuhan
523.5	Pengusaha perikanan
523.6	Nelayan
523.51	Pelabuhan Perikanan Pantai
523.52	TPI/PPI
523.53	Kesyahbandaran
523.6	Pengendalian hama dan penyakit
523.61	Penyakit ikan
523.62	Hama ikan
523.63	Obat-obatan termasuk sertifikasinya
523.7	Konservasi dan Suaka Laut
523.71	Transplantasi bibit karang
523.72	Terumbu karang
523.73	Mangrove
523.74	Garam
523.75	Harta karun di dalam laut
523.76	Pembinaan/Pendidikan masyarakat pesisir
<b>524</b>	<b>PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>
524.1	Produksi
524.11	Susu Ternak Rakyat
524.12	Telur
524.13	Daging
524.14	Kulit

524.2	Sarana Usaha Ternak
524.21	Pembibitan
524.22	Kandang Ternak
524.3	Kesehatan Hewan
524.31	Penyakit Hewan
524.32	Pos Kesehatan Hewan
524.33	Tesi Pullorum
524.34	Karantina
524.35	Pemberantasan Penyakit Hewan termasuk Usaha Pencegahannya
524.4	Perunggasan
524.5	Pengembangan Ternak
524.51	Inseminasi Buatan
524.52	Pembibitan/Bibit Unggul
524.52	Penyebaran Ternak
524.6	Makanan Ternak
524.7	Tempat Pemotongan Hewan
524.8	Data Pertenakan
<b>525</b>	<b>PERKEBUNAN</b>
525.1	Program dan Pelaporan
525.11	Pelaporan
525.12	Monitoring
525.13	Statistik Perkebunan
525.2	Produksi
525.21	Karet
525.22	Teh
525.23	Tembakau
525.24	Tebu
525.25	Cengkeh
525.26	Kelapa/Kopra/Kelapa sawit
525.27	Kopi
525.28	Kakao
525.29	Jenis Tanaman yang lain
525.3	Usaha Perkebunan
525.31	Benih
525.32	Pembibitan
525.33	Kelompok tani
525.34	Kemitraan
525.35	Rekomendasi ijin usaha perkebunan
525.36	Pemasaran Hasil Perkebunan
525.4	Perlindungan Tanaman
525.41	Hama
525.42	Pestisida
525.43	Agensia Pengendalian Hayati
525.5	Alat dan Mesin Perkebunan
525.51	<i>Power Sprayer</i>

525.52	<i>Hand Sprayer</i>
525.53	Polibag
525.54	Alat Laboratorium Perkebunan
525.55	Reagen
525.56	Sarana/Alat Produksi Perkebunan
525.6	Pengolahan lahan
525.61	Terasering
525.7	Pemasyarakatan
525.71	Penyuluhan
525.72	Sosialisasi
525.73	Informasi
<b>526</b>	<b>KETAHANAN PANGAN</b>
526.1	Program Bimbingan Massal
526.2	Pengembangan Sarana Sumber Daya
526.21	Pembinaan Teknologi
526.22	Sarana Produksi dan Permodalan
526.23	Kelembagaan
526.	Agribisnis
526.3	Mutu Hasil
526.31	Pengelola Hasil Pangan
526.32	Pemasaran Hasil
526.33	Kementriaan
526.4	Distribusi Pangan
526.41	Sistem dan pola Distribusi
526.42	Sarana dan Prasarana Distribusi
526.43	Pengadaan dan Cadangan Pangan
526.5	Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan
526.51	Rawan Pangan, Keamanan dan Mutu Pangan
526.52	Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
526.53	Sistem Informasi Pangan
<b>527</b>	<b>PENYULUHAN</b>
527.1	Sumber Daya Manusia
527.11	Penyuluh
527.12	Pelaku Utama Pelaku Usaha
527.13	<i>Stake holder</i>
527.2	Kelembagaan
527.21	Struktural
527.22	Non Struktural
527.23	Pelaku Utama Pelaku Usaha
527.24	Lembaga Profesi
527.3	Penyelenggaraan Penyuluhan
527.31	Program/Metode
527.32	Promosi/Pameran/Kampanye
527.33	Penghargaan/Lomba
527.34	Materi
<b>530</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>

530.1	Undang-undang Gangguan
531	Industri Logam
532	Industri Mesin/Elektronik
533	Industri Kimia/Farmasi
534	Industri Tekstil
535	Industri Makanan/minuman
536	Aneka Industri/Perusahaan
536.1	Home Industri
537	Aneka Kerajinan
537.1	Kerajinan Rakyat
538	Usaha Negara
538.1	Perjan
538.2	Perum
538.3	Persero
539	Perusahaan Daerah
<b>540</b>	<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL/PERTAMBANGAN</b>
541	Minyak dan Gas Bumi
541.1	Pengusahaan
541.11	Perijinan
541.12	Rekomendasi
541.13	Kontrak Karya
541.14	Pengolahan
541.2	Penyaluran
541.3	Tangki, Pompa, Tanker
542	Energi
542.1	Energi alternatif
542.11	Gas Rawa
542.12	Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
542.13	Biogas
542.14	Energi baru terbarukan
542.15	Perijinan
542.16	Rekomendasi
542.17	Pembinaan dan Pengawasan
542.2	Konservasi Energi
542.3	Pemetaan Energi
542.4	Rencana Umum Perencanaan Energi Daerah (RUPED)
543	Pertambangan, mineral dan batubara
543.1	Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP)
543.11	WIUP Batuan
543.12	WIUP Bukan Logam
543.13	WIUP Logam
543.14	WIUP Batubara
543.2	Rekomendasi Teknis
543.3	Perijinan
543.31	IUP Eksplorasi
543.32	IUP Operasi Produksi



543.33	IUP Operasi Produksi Khusus
543.34	Ijin Usaha Jasa Pertambangan
543.35	Pencabutan Ijin
543.4	Pembinaan
543.5	Pengawasan
543.51	Pengawasan Usaha Pertambangan
543.52	Pencerbitan Kegiatan Pertambangan
543.6	Pasca Tambang
543.61	Reklamasi
543.62	Penutupan
544	Air tanah
544.1	Cekungan Air Tanah (CAT)
544.11	Pemetaan CAT
544.12	Imbuhan CAT
544.13	Lepasan CAT
544.14	Konservasi
544.15	Pengendalian Daya Rusak
544.2	Rekomendasi Teknis
544.3	Sumur Artesis
544.4	Sumur Bor
544.5	Sumur Gali (Pasak)
544.6	Pengusaha Pengebor (APATINDO)
544.7	Sumur Pantau
544.8	Harga Dasar Air/Nilai Perolehan Air
544.9	Hidrologi
546	Geologi
546.1	Pemetaan
546.2	Mitigasi Bencana Geologi
546.3	Vulkanologi
546.31	Pengawasan Vulkanologi
546.32	Panas Bumi
546.4	Hidrogeologi
547.5	Gerakan Tanah (Longsoran, amblesan)
547.6	Pengawasan, pengendalian
547	Hidrologi
548	Kesamudraan
<b>550</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>
551	Perhubungan Darat
551.1	Lalu lintas jalan raya, sungai, danau
551.11	Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu
551.12	Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (Keur)
551.13	Kecelakaan Lalu Lintas
551.2	Angkutan Jalan Raya
551.21	Perizinan
551.22	Terminal
551.23	Alat Angkutan

551.24	Jembatan Timbang/Lebih Muatan
551.25	Uji Mutu
551.3	Angkutan Sungai
551.31	Perizinan
551.32	Terminal
551.33	Pelabuhan
551.34	Trayek
551.35	Sarana/Kapal
551.36	-
551.37	
551.38	Kecelakaan
551.39	Keselamatan/Rambu-rambu
551.4	Angkutan Danau
551.41	Perizinan
551.42	Terminal
551.43	Pelabuhan
551.44	Trayek
551.45	Sarana/Kapal
551.46	-
551.47	Lalu Lintas
551.48	Kecelakaan
551.49	Keselamatan, Rambu-rambu
551.5	Feri
551.51	Perizinan
551.52	Terminal
551.53	Pelabuhan
552	Perhubungan Laut
552.1	Lalu Lintas Angkutan Laut
552.11	Pelayaran Dalam Negeri
552.12	Pelayaran Luar Negeri
552.13	Pelayaran Haji
552.14	Pelayaran <i>Charter</i> /Wisata Turis
552.15	Pelayaran Khusus
552.16	Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu
552.2	Perkapalan-Alat Angkutan
552.21	Kapal Penumpang
552.22	Kapal Barang
552.23	Kapal Perang/Patroli/Negara
552.24	Kapal Tanker
552.25	Ponton/Tongkang
552.26	Kapal Layar
552.27	Kapal Layar Motor
552.28	Kapal Kontainer
552.3	Pelabuhan
552.31	Tanah/Lokasi
552.32	Alur Layar

552.33	Dermaga
552.34	Terminal Penumpang
552.35	Terminal Kontainer
552.36	Bangunan/Gedung/Gudang
552.37	Perlengkapan Tambat Labuh
552.38	Lapangan Penumpukan
552.39	Pelabuhan Khusus/Dermaga Khusus
552.4	Pengerukan/Perawatan
552.41	Alur Pelayaran
552.42	Kolam Pelabuhan
552.43	Reklamasi Pantai
552.44	Dumping Area
552.45	Pekerjaan Bawah Air ( <i>Salvage</i> )
552.5	Penjagaan Pantai
552.51	Patroli Bandar
552.52	Patroli Perairan
552.53	Penjagaan Pantai & Penanggulangan Keselamatan di Laut (GAMAT)
552.6	Angkutan Barang
552.61	P O S
552.62	Minyak
552.63	L o g
552.64	Ternak
552.65	Sembilan Bahan Pokok
552.66	Peti Kemas / EMKL
552.67	Muatan Umum
552.68	Barang Dalam Negeri, Barang Luar Negeri
552.69	Bongkar Muatan
552.7	Keselamatan
552.71	Rambu-rambu/Mercu suar
552.72	Kelaikan Kapal/Pembangunan Kapal
552.73	Fasilitas Keselamatan/Keamanan
552.74	Telekomunikasi Pelayaran
552.75	Sertifikasi Kesempurnaan Kapal
552.76	Sertifikasi Awak Kapal
552.8	Kecelakaan, Gangguan
552.81	Kecelakaan Penumpang/Kapal
552.82	Kecelakaan Barang
552.83	Gangguan Sarana/Prasarana
552.84	Pembajakan/Penyeludupan
552.85	Pencemaran
552.9	Perijinan
552.91	Ijin Berlayar
552.92	Ijin Pekerjaan Bawah Air
552.93	Ijin Pembuatan dan Perubahan Bentuk Kapal
552.94	Ijin Pembukaan Kantor Cabang

552.95	Ijin Usaha Angkutan Laut
552.96	Ijin Usaha Penunjang Angkutan Laut
552.97	Ijin Pelayanan Jasa Kepelabuhan
552.98	Ijin Pembangunan Pelabuhan Khusus
552.99	Ijin Pembangunan Dermaga Khusus
553	Perhubungan Udara
553.1	Lalu Lintas Angkutan Udara
553.11	Penerbangan Domestik
553.12	Penerbangan Luar Negeri
553.13	Penerbangan Haji
553.14	Penerbangan Charter/Non Reguler
553.15	Penerbangan Khusus/Jembatan Udara
553.2	Pelabuhan Udara
553.21	Tanah/Lokasi
553.22	Landasan
553.23	Apron
553.24	Terminal Penumpang
553.25	Terminal Cargo
553.26	Bangunan/Gedung
553.27	Perlengkapan
553.28	Parkir Kendaraan
553.3	Alat Angkutan
553.31	Pesawat Udara
553.32	Helikopter
553.4	Angkutan Barang
553.41	P o s
553.42	Muatan Dalam Negeri
553.43	Muatan Luar Negeri
553.44	EMPU
553.5	Sertifikasi Kelaikan
553.51	Kelaikan Pesawat Udara
553.52	Kelaikan Peralatan Penunjang
553.53	Kelaikan Personil/Awak Kapal
553.6	Keselamatan
553.61	Rambu-rambu
553.62	Perakitan/Kalibrasi
553.63	Fasilitas Keselamatan
553.64	Telekomunikasi Penerbangan
553.7	Kecelakaan/Gangguan
553.71	Kecelakaan Penumpang
553.72	Kecelakaan Barang
553.73	Gangguan Sarana/Prasarana
553.74	Pembajakan
553.75	Pencemaran
553.8	Umum
553.81	Asuransi

553.82	Asosiasi
553.83	SATPAM
553.84	Rally Udara/Lomba
553.9	Perizinan
553.91	Izin Terbang/Flight Approval
553.92	Usaha Kegiatan Penunjang Penerbangan / EMPU
553.93	Pembukaan Kantor Cabang
553.94	Rekomendasi Ketinggian Bangunan
553.95	Pembangunan Bandar Udara Khusus
<b>554</b>	<b>POS</b>
554.1	Pembinaan
554.11	Kebutuhan fasilitas
554.12	Rehabilitasi/Perawatan
554.13	Bina Usaha/Pengawasan/Penerbitan
554.14	Standarisasi Perangkat
554.15	Tanah/Bangunan
554.16	Filateli
554.17	Asosiasi
554.18	Laporan dan Evaluasi
554.2	Pelayanan
554.21	Jasa pos
554.22	Jasa titipan
554.23	Jasa giro
554.24	Benda pos/perangko
554.25	Sampul peringatan
554.26	Jasa pos Elektronik
554.3	Perijinan
554.31	Rekomondasi usaha Jasa pos/Titipan
554.32	Pembukaan Agen/Cabang
554.4	Gangguan Sarana dan Prasarana
554.41	Kecelakaan
554.42	Sabotase
554.43	Penyeludupan
<b>555</b>	<b>Teknologi Informasi</b>
555.1	Telepon
555.2	Telegram
555.3	Telex/SSB, <i>Faximile</i>
555.4	Internet/USO
555.5	Satelit, Stasiun Bumi
555.6	Radio Kumunikasi
556	Pariwisata dan Rekreasi
556.1	Usaha Pariwisata
556.11	Usaha Jasa Pariwisata
556.111	Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata
556.112	Restoran dan Rumah Makan
556.12	Ijin Usaha Obyek dan Atraksi Wisata

556.13	Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata
556.14	Usaha Sarana Pariwisata
556.141	Ijin Pariwisata
556.142	Ijin Usaha Pariwisata
556.143	Ijin Usaha Jasa Pariwisata
556.144	Ijin Pengusaha Objek dan Daya Tarik Wisata
556.145	Ijin Usaha Sarana
556.15	Wisatawan
556.151	Wisatawan Nusantara
556.152	Wisatawan Mancanegara
556.16	Promosi dan Informasi Pariwisata
556.161	Dalam Negeri
556.162	Luar Negeri
556.2	Perhotelan
556.21	Status Hotel
556.22	Kelas Hotel
556.23	Tarif
556.3	<i>Travel Service</i>
556.31	Pramu Wisata
556.32	Biro Perjalanan / Angkutan Wisata
556.33	<i>Souvenir</i>
556.34	Kemudahan Wisata ( Visa, Bea Cukai, Karantina)
556.4	Tempat Rekreasi
556.41	Obyek dan Daya Tarik Wisata
556.411	Ciptaan Tuhan
556.412	Hasil Karya Manusia
556.42	Rehabilitasi/Perawatan
556.43	Pengembangan Fasilitas
556.44	Tanah / Bangunan
556.45	Bina Usaha
556.46	Institusi
556.461	Asosiasi
556.462	Lembaga kepariwisataan
<b>557</b>	<b>Metereologi</b>
557.1	Ramalan Cuaca
557.2	Curah Hujan
557.3	Kemarau Panjang
<b>560</b>	<b>TENAGA KERJA</b>
560.1	Pengangguran
560.11	Data Persediaan TKI / TKW Dari Daerah
560.2	<i>Job Order</i> TKI Ke Luar Negeri oleh PJTKI
560.3	Rekrutmen Calon TKI / TKW
560.4	Seleksi Naker Ke Luar Negeri
560.41	Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI / TKW
560.42	Berkas Persyaratan Calon TKI /TKW
560.43	Pemeriksaan dan Hasil Cek Kesehatan TKI / TKW

560.5	Persyaratan Naker TKI / TKW
560.51	Permohonan Rekomendasi <i>Passport</i>
560.52	Perjanjian Kerja TKI/TKW
560.53	Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI)
560.54	Permohonan Fiskal Ke Luar Negeri
560.55	Pelatihan TKI/TKW
560.6	Pemberangkatan Naker
560.61	Pemberangkatan ke Luar Negeri
560.62	Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI/TKW ke Luar Negeri
560.63	Berita Acara Serah Terima TKI/TKW
560.7	Pemulangan Naker
560.71	Kepulangan TKI/TKW karena Kontraknya Habis
560.72	Pemulangan TKI/TKW Ilegal
560.73	TKI/TKW Terkena Kasus Pidana
561	Upah
561.1	Kegiatan dan Hasil Sidang Dewan Penelitian Pengupahan Daerah/Nasional
561.2	Pemohonan Penangguhan Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum Kabupaten
561.3	Kebutuhan Fisik Minuman
561.4	Perhitungan Upah Kerja (termasuk didalamnya upah lembur)
561.5	Laporan Data <i>Remittance</i>
561.6	Pembayaran Gaji/Upah TKI/TKW
562	Penempatan Tenaga Kerja
562.1	Penempatan Naker Penempatan Naker Mandiri Terdidik (TKMT)
562.11	Penempatan Naker Mandiri Profesional (TKMP)
562.12	Penempatan Naker Non Terdidik dan Non Profesional
562.13	Pengembangan Kesempatan Berusaha/Peluasan Kerja
562.2	Kesepakatan Kerja Bersama
562.3	Lembaga Penyalur Naker
562.31	Ijin Pendirian Lembaga Penyaluran Naker Antar Kerja Lokal/Daerah dan Antar Kerja Negara (AKAN)
562.32	Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI/BKS/BKK)
562.33	Pencabutan Ijin Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI, BKK, BKS)
563	Latihan Kerja
563.1	Pendidikan Pekerja
563.11	Pendidikan dan Latihan Kerja
563.12	Diklat di Dalam Negeri (PKL, Prakerin, OJT)
563.13	Diklat di Luar Negeri (Pemagangan)
563.2	Sarana dan Prasarana Latihan Kerja
563.21	Tempat Pelatihan (BLK)
563.22	Instruktur/Pelatihan
563.23	Modul/Silabus dan Bahan Praktek
563.24	Kurikulum dan Metode Pengajaran
563.25	Sertifikat

563.3	Kerjasama Pelatihan Tenaga Kerja
564	Tenaga Sukarela
564.1	Butsi
564.2	Padat Karya
565	Perselisihan Pekerja
565.1	Perselisihan dan Perkara Hukum Naker
565.11	Pengaduan Perkara Pekerja / NAKER
565.12	Pemeriksaan Perkara Pekerja / NAKER
565.13	Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pekerja / NAKER
565.14	Sidang Perkara Perselisihan Pekerja / NAKER
565.15	Hasil Putusan Sidang Perkara Perselisihan Pekerja (NAKER)
565.16	Peninjauan Kembali Hasil Putusan Sidang KP2K (PAD/P4P)
565.17	Permintaan Eksekusi Terhadap hasil Keputusan KP2K (PAD/P4P)
565.18	Daftar Usulan, Susunan dan Penetapan Anggota KP2K (PAD/P4P)
565.2	Pemogokan/Unjuk Rasa Tenaga Kerja
566	Keselamatan Kerja
566.1	Instalasi Proteksi Kebakaran
566.2	Pemakaian Alat Keselamatan Kerja
566.3	Keterangan Kelayakan atau Pelindung Diri (APD) dalam bekerja
566.4	Pengangkatan dan Pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
566.5	Pelatihan/Pembinaan Hyperkes dan Keselamatan Kerja
566.6	Pengujian dan Hasil Pemeriksaan Hyperkes
566.7	Gangguan Lingkungan Tempat Usaha
566.8	Perlengkapan Sarana Kerja
566.81	Pemasangan dan Pemakaian Lift (pesawat angkat/angkut)
566.82	Pemasangan dan Pemakaian Uap (ketel uap)
566.83	Pemasangan dan Pemakaian Motor Diesel
566.84	Pemasangan dan Pemakaian tangki tak bertekanan
566.85	Pemasangan dan Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran
566.9	Ijin Tenaga Kerja Wanita Masuk malam hari (shifht malam)
567	Pemutusan Hubungan Kerja
567.1	Pengaduan PHK sepihak
567.2	PHK massal
567.3	Bantuan hukum bagi pekerja yang di PHK
567.4	Ijin melakukan PHK
567.5	Perhitungan masa kerja bagi pekerja yang di PHK
567.6	Pemberian uang tunggu bagi pekerja yang di PHK
567.7	Pemberian uang pesangon bagi pekerja yang di PHK
568	Kesejahteraan Pekerja
568.1	Bantuan Kredit/bantuan Modal kerja bagi Naker
568.11	Pemilihan Pekerja Teladan
568.2	Perumahan Pekerja
568.3	Keikutsertaan Pekerja Dalam Program Jamsostek



568.4	Koperasi Pekerja
568.5	Sarana Transportasi Pekerja
568.6	Perpustakaan Pekerja
568.7	Tempat Ibadah Pekerja
568.8	Rekreasi dan Olah Raga Pekerja
568.9	Pendirian, Pendaftaran, dan Kegiatan Organisasi Pekerjaan
568.91	Lembaga Kerjasama Bipartid
569	Tenaga Kerja Orang Asing
569.1	Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA)
569.2	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
569.3	Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing
569.4	Perjanjian Kerja Dengan Tenaga Asing
569.5	Data Tenaga Kerja Asing
569.6	Kecelakaan/Kematian Tenaga Kerja Asing
569.7	Pemulangan Tenaga Kerja Asing
569.8	Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing
569.9	Tenaga Kerja Asing Ilegal
<b>570</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>
571	Penanaman Modal Dalam Negeri
572	Penanaman Modal Asing
573	Modal Patungan ( <i>joint venture</i> / penyertaan modal)
574	Pasar Uang dan Modal
575	Saham
576	Belanja Modal
577	Modal Daerah
<b>580</b>	<b>PERBANKAN / MONETER</b>
581	Kredit
582	Investasi
583	Tabungan
583.1	Deposito
583.2	Tabanas
583.3	Taska
583.4	Tapelpram
584	Bank Pembangunan Daerah
585	Asuransi
585.1	Dana Kecelakaan Lalu Lintas
585.2	Polis
585.3	Premi
585.4	Tertanggung/Pemegang Polis
585.5	Uang Pertanggungan
586	Alat Pembayaran meliputi <i>check</i> , giro wesel, transfer
587	Fiskal
588	Hutang Negara Obligasi
589	Moneter
<b>590</b>	<b>AGRARIA</b>
591	Tata Guna Tanah

591.1	Pemetaan dan Pengukuran
591.2	Perpetaan
591.3	Penyediaan Data, Peta dan Publikasi
591.4	Fakta Tata Guna Tanah
591.5	Tanah Kritis
592	<i>Landreform</i>
592.1	Redistribusi
592.11	Pendaftaran Pemilik dan Pengurus Tanah Pertanian
592.12	Penentuan Tanah Objek <i>Landreform</i>
592.13	Pembagian Tanah <i>Landreform</i>
592.14	Sengketa Redistribusi Tanah Objek <i>Landreform</i>
592.2	Ganti Rugi
592.21	Ganti Rugi Tanah Kelebihan
592.22	Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan
592.23	Ganti Rugi Tanah <i>Absentee</i>
592.24	Sengketa Ganti Rugi Tanah <i>Absentee</i>
592.25	Ganti Rugi Tanah Partikelir
592.26	Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir
592.3	Bagi Hasil
592.31	Penetapan Imbangan Gadai Tanah
592.32	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
592.33	Sengketa Perjanjian Bagi Hasil
592.4	Gadai Tanah
592.41	Pendaftaran Pelaksanaan Gadai tanah
592.42	Pelaksanaan Gadai Tanah
592.43	Sengketa Gadai Tanah
592.5	Bimbingan dan Penyuluhan
592.6	Pengembangan
592.7	Yayasan Dana <i>Landreform</i> (YDL)
593	Pengurusan Hak-Hak Tanah
593.1	Penyusunan Program dan Bimbingan Teknis
593.11	Sewa Tanah
593.12	Sewa Tanah Untuk Tanaman Tertentu: Tebu, Tembakau, Rosela, <i>Corchorus</i> .
593.2	Hak Milik
593.21	Perorangan
593.22	Badan Hukum
593.3	Hak Pakai
593.31	Perorangan
593.311	Warga Negara Indonesia
593.312	Warga Negara Asing
593.32	Badan Hukum
593.321	<i>Badan Hukum Indonesia</i>
593.322	Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat, Kantor Dagang Asing
593.33	Tanah Gedung-Gedung Negeri

593.4	Guna Usaha
593.41	Perkebunan Besar
593.42	Perkebunan Rakyat
593.43	Peternakan
593.44	Perikanan
593.45	Kehutanan
593.5	Hak Guna Bangunan
593.51	Perorangan
593.52	Badan Hukum
593.53	P3MB (Panitia Pelaksanaan Pengusaha Milik Belanda )
593.54	Badan Hukum Asing Belanda- PBK No.5 / 56
593.55	Pemulihan Hak (Pen Pres 4 / 1960)
593.6	Hak Pengelolaan
593.61	PN Perumnas, <i>Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate</i>
593.62	Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan
593.7	Sengketa Tanah
593.71	Peradilan Perkara Tanah (lihat juga 183)
593.8	Pencabutan dan Pembebasan Tanah
593.81	Pencabutan Hak
593.82	Pembebasan Tanah
593.83	Ganti Rugi Tanah
594	Pendaftaran Tanah
594.1	Pengukuran/ Pemetaan
594.11	Fotogrametri
594.12	Terristris
594.13	Triangulasi
594.14	Peralatan
594.2	Dana Pengukuran (Permen Agraria No.6/1960)
594.3	Sertifikat
594.4	Pejabat Pembuatan Akte Tanah
595	Transmigrasi
595.1	Tata Guna Tanah
595.2	<i>Landreform</i>
595.3	Pengurusan Hak-hak Tanah
595.4	Pendaftaran Tanah
<b>600</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN</b>
601	Tata Bangunan Konstruksi dan Industri Konstruksi
602	Kontraktor Pemborong
602.1	Tender
602.2	Penunjukan
602.3	Prakualifikasi
602.31	Daftar Rekanan Mampu (DRM)
602.32	Tanda Daftar Rekanan
603	Arsitektur
604	Bahan Bangunan
604.1	Tanah dan Batu

604.2	Aspal
604.3	Besi dan Logam Lainnya
604.31	Besi Beton
604.32	Besi Profil (Konstruksi)
604.33	Paku
604.34	Alumunium Profil
604.4	Bahan Bahan Perlindungan dan Pengawet (Cat, Tech, oil, Pengawet Kayu)
604.5	Semen
604.6	Kayu
604.7	Bahan Penutup Atap
604.8	Alat Alat Penggantung dan Pengunci
604.9	Bahan Bahan Bangunan Lainnya
605	<b>I n s t a l a n s i</b>
605.1	Instalansi Bangunan
605.2	Instalansi Listrik
605.3	Instalansi Air / Sanitasi
605.4	Instalansi Pengatur Udara
605.5	Instalansi Akustik
605.6	Instalansi Cahaya / Penerangan
606	Konstruksi Pencegahan
606.1	Konstruksi Pencegahan Terhadap Kebakaran
606.2	Terhadap Gempa
606.3	Terhadap Angin / Udara / Panas
606.4	Terhadap Kegaduhan
606.5	Terhadap Gas / <i>Explosive</i>
606.6	Terhadap Serangga
606.7	Terhadap Radiasi Atom
<b>610</b>	<b>PENGAIRAN</b>
611	Irigasi
611.1	Bangunan Waduk
611.11	Bendungan
611.12	Tanggul
611.13	Pelimpahan banjir
611.14	Menara pengambilan
611.15	Pembangunan dermaga
611.2	Bangunan pengambilan
611.21	Bendungan
611.22	Bendungan dengan pintu bilas
611.23	Bendungan dengan pompa
611.24	Pengambilan bebas
611.25	Pengambilan bebas dengan pompa
611.26	Sumur dengan pompa
611.27	Kantung lumpur
611.28	<i>Silf ekstretor</i>
611.29	<i>Escope chenel</i>

611.3	Bangunan pembawa
611.31	Saluran
611.311	Saluran Induk
611.312	Saluran sekunder
611.313	Suplesi
611.314	Tersier
611.315	Saluran kwarter
611.316	Saluran pasangan
611.317	Saluran tertutup/terowongan
611.32	Bangunan
611.321	Bangunan bagi
611.322	Bangunan dan sadap
611.323	Bangunan sadap
611.324	Bangunan check
611.325	Bangunan terjun
611.33	<i>Bax</i> Tersier
611.34	Got miring
611.35	Talang
611.36	Syphon
611.37	Gorong-gorong
611.38	Pelimpahan samping
611.4	Bangunan Pembuangan
611.41	Saluran
611.411	Saluran Pembuangan induk
611.412	Saluran Pembuangan sekunder
611.413	Saluran Pembuangan tersier
611.42	Bangunan
611.421	Bangunan <i>out let</i>
611.422	Bangunan terjun
611.423	Bangunan penahan banjir
611.43	Gorong-gorong pembuangan
611.44	Talang pcmbuang
611.45	Syphon pembuangan
611.5	Bangunan lainnya
611.51	Jalan
611.511	Jalan Inspeksi
611.512	Jalan Logistik
611.52	Jembatan
611.521	Jembatan Inspeksi
611.522	Jembatan Hewan
611.53	Tangga Cuci
611.54	Kubangan Kerbau
611.55	Waduk Lapangan
611.56	Bangunan Penunjang
611.57	Jaringan Telepon
611.58	Stasiun Argo

611.59	Bangunan TPI dan Pasar Ikan
612	Folder
612.1	Tanggul Keliling
612.11	Tanggul
612.12	Bangunan Penutup Sungai
612.13	Jembatan
612.2	Bangunan Pembawa
612.21	Saluran
612.211	Saluran Muka
612.212	Saluran Pembawa Induk
612.213	Saluran Pembawa Sekunder
612.214	Saluran Stasiun Pompa Pemasukan
612.22	Bangunan Bagi:
612.221	Gorong-Gorong
612.222	Syphon
612.3	Bangunan Pembuangan
612.31	Stasiun Pompa Pembuangan
612.32	Saluran
612.321	Saluran Pembawa Induk
612.322	Saluran Pembawa Sekunder
612.33	Pintu Air Pembuangan
612.34	Gorong-gorong Pembuangan
612.35	Syphon Pembuangan
612.4	Bangunan Lainnya
612.41	Bangunan
612.411	Bangunan Pengukur Air
612.412	Bangunan Pengukur Curah Hujan
612.413	Bangunan Gudang Stasiun Pompa
612.414	Bangunan Listrik Stasiun Pompa
612.42	Rumah Petugas Eksploitasi
613	Pasang Surut
613.1	Bangunan Pembawa
613.11	Saluran Pembawa Induk
613.12	Saluran Pembawa Sekunder
613.13	Saluran Pembawa Tersier
613.14	Saluran Penyimpanan Air
613.15	Saluran Pintu Pembuangan
613.2	Bangunan Pembuangan
613.21	Saluran Pembawa Induk
613.22	Saluran Pembawa Sekunder
613.23	Saluran Pembawa Tersier
613.24	Saluran Penyimpanan Air
613.25	Saluran Pintu Pembuangan
613.3	Bangunan Lainnya
613.31	Kolom Pasang
613.32	Saluran

613.321	Saluran Lalu Lintas
613.322	Saluran Muka
613.33	Bangunan
613.331	Bangunan Penangkis Kotoran
613.332	Bangunan Pengukur Muka Air
613.333	Bangunan Pengukur Curah Hujan
613.34	Jalan
613.35	Jembatan
614	Pengendalian Sungai
614.1	Bangunan Pengaman
614.11	Tanggul Banjir
614.12	Pintu Pengatur Banjir
614.13	Klep Pengatur Banjir
614.14	Tembok Pengaman Talut
614.15	Krib
614.16	Kantung Lumpur
614.17	<i>Check Dam</i>
614.18	Syphon
614.2	Saluran Pengaman
614.21	Saluran Banjir
614.22	Saluran <i>Drainage</i>
614.23	Corepure
614.3	Bangunan Lainnya
614.31	<i>Warning System</i>
614.32	Stasiun
614.321	Stasiun Pengukur Curah Hujan
614.322	Stasiun Pengukur Air
614.323	Stasiun Pengukur Cuaca
614.324	Stasiun Pos Penjagaan
615	Pengaman Pantai
615.1	Tanggul
615.2	Krib
615.3	Bangunan Lainnya
616	<i>Air Permukaan (Danau, Waduk, Sungai)</i>
616.1	Stasiun Pompa
616.2	Bangunan Pembawa
616.3	Bangunan Pembuangan
616.4	Bangunan Lainnya
<b>620</b>	<b>JALAN</b>
621	Jalan Kota / Kabupaten
621.1	Dacrah Penguasaan
621.11	Tanah
621.12	Tanaman
621.13	Bangunan
621.2	Bangunan Sementara
621.21	Jalan Sementara

621.22	Kantor Proyek
621.23	Gedung Proyek
621.24	Barak Kerja
621.25	Laboratorium Lapangan
621.26	Rumah
621.3	Badan Jalan
621.31	Pekerjaan Tanah ( <i>Earth Work</i> )
621.32	Stabilisasi
621.4	Perkerasan
621.41	Lapisan Pondasi Bawah
621.42	Lapisan Pondasi
621.43	Lapisan Permukaan
621.5	<i>Drainage</i>
621.51	Parit Tanah
621.52	Gorong -Gorong ( <i>Culvert</i> )
621.6	Buku Trotoir
621.61	Tanah
621.62	Perkerasan
621.63	Pasangan
621.7	Medium
621.71	Tanah
621.72	Tanaman
621.73	Perkerasan
621.74	Pasangan
621.8	Daerah Sampingan
621.81	Tanaman
621.82	Pagar
621.9	Bangunan Pelengkap dan Pengamanan
621.91	Rambu-rambu / Tanda-tanda Lalu Lintas
621.92	Lampu Penerangan
621.93	Lampu Pengaturan Lalu Lintas
621.94	Patok-patok KM
621.95	Patok-patok R.O.W.(Sempadan)
621.96	Rel Pengamanan
621.97	Pagar
621.98	Turap Penahan
621.99	Bronjong
622	Jalan Luar Kota
622.1	Daerah Penguasaan
622.11	Tanah
622.12	Tanaman
622.13	Bangunan
622.14	Jalan Sementara
622.15	Jembatan Sementara
622.16	Kantor/ Gedung Proyek
622.17	Barak Kerja



622.18	Laboratorium Lapangan
622.19	Rumah
622.2	Badan Jalan
622.21	Pekerjaan Tanah ( <i>Earth Work</i> )
622.22	Stabilisasi
622.3	Perkerasan ( <i>Pavement</i> )
622.31	Lapis Pondasi Bawah
622.32	Lapis Pondasi
622.33	Lapis Permukaan
622.4	<i>Drainage</i>
622.41	Parit
622.42	Gorong-gorong ( <i>culvert</i> )
622.43	Buku Trotoir
622.44	Tanah
622.45	Perkerasan
622.5	Trotoir
622.51	Tanah
622.52	Perkerasan
622.6	Trotoar
622.61	Tanah
622.62	Tanaman
622.63	Perkerasan
622.64	Pasangan
622.7	Median
622.71	Tanah
622.72	Tanaman
622.9	Bangunan Perlengkapan dan Pengamanan
622.91	Rambu-rambu
622.92	Lampu penerbangan
622.93	Lampu Pengatur lalu lintas
622.94	Patok-patok KM
622.95	Patok-patok R,O,W (Sempadan)
622.96	Rel pengamanan
622.97	Pagar
622.98	Turap penahan
622.99	Bronjong
623	Jalan Nasional
623.1	Daerah penguasaan
623.2	Badan jalan
623.3	Perkerasan (lapis pondasi, lapis permukaan)
623.4	Drainase (gorong-gorong, parit)
623.5	Median
623.6	Daerah samping (pagar, tanaman)
623.7	Bangunan pelengkap dan pengamanan (rambu-rambu)
<b>630</b>	<b>JEMBATAN</b>
631	Jembatan pada jalan Kota/Kabupaten

631.1	Daerah penguasaan
631.11	Tanah
631.12	Tanaman
631.13	Bangunan
631.2	Bangunan sementara
631.21	Jalan sementara
631.22	Jembatan sementara
631.23	Kantor proyek
631.24	Gedung proyek
631.25	Barak kerja
631.26	Laboratorium lapangan
631.27	Rumah
631.3	Pekerjaan Tanah ( <i>Earth Work</i> )
631.31	Galian tanah
631.32	Timbunan tanah
631.4	Pondasi
631.41	Pondasi kepala jembatan
631.42	Pondasi Pilar
631.43	Pondasi angker
631.5	Bangunan bawah
631.51	Kepala jembatan
631.52	Pilar
631.53	Piloon
631.54	Landasan
631.6	Bangunan
631.61	Gelagar
631.62	Lantai
631.63	Perkerasan
631.64	Jalan orang/trotoir
631.65	Sandaran
631.66	Talang air
631.7	Bangunan pengaman
631.71	Turap/penahan
631.72	<i>Bronjong</i>
631.73	<i>Strek Dam</i>
631.74	<i>Kist Dam</i>
631.75	<i>Coupute</i>
631.76	Krip
631.8	Bangunan pelengkap
631.81	Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas
631.82	Patok pengamanan
631.83	Patok R, O, W (Sempadan)
631.9	Oprit
631.91	Badan
631.92	Perkerasan
631.93	<i>Drainage</i>

631.94	Baku
631.95	Mediun
632	Jembatan pada jalan Luar Kota
632.1	Daerah Penguasaan
632.11	Tanah
632.12	Tanaman
632.13	Bangunan
632.2	Bangunan sementara
632.21	Jalan sementara
632.22	Jembatan sementara
632.23	Kantor proyek
632.24	Gedung proyek
632.25	Barak kerja
632.26	Laboratorium lapangan
632.27	Rumah
632.3	Pekerjaan Tanah ( <i>Earth Work</i> )
632.31	Galian tanah
632.32	Timbunan tanah
632.4	Pondasi
632.41	Pondasi kepala jembatan
632.42	Pondasi Pilar
632.43	Pondasi angker
632.5	Bangunan bawah
632.51	Kepala jembatan
632.52	Pilar
632.53	Piloon
632.54	Landasan
632.6	Bangunan
632.61	Gelagar
632.62	Lantai
632.63	Perkerasan
632.64	Jalan orang/trotoir
632.65	Sandaran
632.66	Talang air
632.7	Bangunan pengaman
632.71	Turap/penahan
632.72	Bronjong
632.73	Strek Dam
632.74	Kist Dam
632.75	Coupute
632.76	Krip
632.8	Bangunan pelengkap
632.81	Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas
632.82	Patok pengamanan
632.83	Patok R, O, W (Sempadan)
632.9	Oprit

632.91	Badan
632.92	Perkerasan
632.93	<i>Drainage</i>
632.94	Baku
632.95	Mediun
633	Jembatan pada jalan Nasional
633.1	Daerah Penguasaan (tanah, tanaman, bangunan)
633.2	Bangunan sementara (gudang proyek, kantor proyek)
633.3	Pondasi
633.4	Bangunan bawah
633.5	Bangunan (gelagar, lantai, sandaran, perkerasan)
633.6	Bangunan Pengamanan (bronjong strek dam, krib)
633.7	Bangunan pelengkap dan pengaman (rambu-rambu)
<b>640</b>	<b>BANGUNAN</b>
640	Bangunan Pemerintah
640.1	Gedung Pengadilan
640.2	Rumah Pejabat Negara
640.3	Gedung DPR
640.4	Gedung Balai Kota
640.5	Penjara
640.6	Perkantoran
642	Bangunan Pendidikan
642.1	Taman Kanak-kanak
642.2	SD & Sekolah Menengah
642.3	Perguruan Tinggi
643	Bangunan Rekreasi
643.1	Bangunan Olah Raga
643.2	Gedung Kesenian
643.3	Gedung Pemancar
644	Bangunan Perdagangan
644.1	Pusat Perbelanjaan
644.2	Gedung Perdagangan
644.3	Bank
644.4	Perkantoran
645	Bangunan Pelayanan Umum
645.1	Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Umum
645.2	Gedung parkir
645.3	Rumah Sakit
645.4	Gedung telkom
645.5	Terminal Angkutan Umum
645.6	Terminal Angkutan Air
645.7	Terminal Angkutan Darat
645.8	<i>Bangunan Kcagamaan</i>
646	Bangunan Peninggalan Sejarah
646.1	Monumen
646.2	Candi

646.3	Kraton
646.4	Rumah Tradisional
647	Bangunan Industri
648	Bangunan Tempat Tinggal
648.1	Rumah Perkotaan
648.11	Inti/Sederhana
648.12	Sedang/Mewah
648.2	Rumah Pedesaan
648.21	Rumah Contoh
648.3	<i>Real estate</i>
649	Elemen bangunan
649.1	Pondasi
649.11	Diatas Tiang
649.2	Dinding
649.21	Penahan beban
649.22	Tidak menahan beban
649.3	Atap
649.4	Lantai / langit-langit
649.41	Suspendend
649.42	Solit
649.5	Pintu / jendela
649.51	Pintu hermonik
649.52	Pintu biasa
649.53	Pintu sorong
649.54	Jendela kayu
649.55	Jendela sorong
649.56	Jendela vertical
<b>650</b>	<b>TATA RUANG KOTA</b>
651	Daerah Perdagangan / Pelabuhan
651.1	Daerah Pusat Perbelanjaan
651.2	Daerah Perkantoran
652	Daerah Pemerintahan
653	Daerah Perumahan ( <i>Site dan Servei</i> )
653.1	Kepadatan Rendah ( <i>Low Density</i> )
653.2	Kepadatan Tinggi ( <i>High Density</i> )
654	Daerah Industri
654.1	Industri Berat
654.2	Industri Ringan
654.3	Industri Rumah ( <i>Home Industri</i> )
655	Daerah Rekreasi ( <i>Open Spece</i> )
655.1	<i>Public Garden</i>
655.2	<i>Sport dan Playing Fields</i>
655.3	<i>Open Spece</i>
656	Transportasi (Tata Letak)
656.1	Jaringan Jalan
656.11	Penerangan Jalan

656.2	Jaringan Kereta Api
656.3	Jaringan Sungai
657	<i>Assineering</i>
657.1	Saluran Pengumpulan
657.2	Instansi Pengolahan
657.21	Bangunan
657.22	Bangunan Penyaring
657.23	Bangunan Penghancur Kotoran
657.24	Bangunan Pengendapan
657.25	Bangunan Pengering Lumpur
657.26	Unit Disinfektan
657.27	Unit Perpompaaan
658	Kesehatan Lingkungan
658.1	Persampahan
658.11	Bangunan Pengumpulan
658.12	Bangunan Pemusnahan
658.2	Pengotoran Udara
658.3	Pengotoran Air
658.31	Air Buangan Industri
658.4	Kegaduhan
658.5	Kebersihan Kota
<b>660</b>	<b>TATA LINGKUNGAN</b>
660.1	Persampahan
660.2	Kebersihan Lingkungan
660.3	Pencemaran
660.31	Pencemaran Air
660.32	Pencemaran Udara
660.33	Pencemaran Tanah
660.34	Pencemaran Limbah Padat dan Bahan Berbahaya Beracun (B3)
661	Daerah Hutan
662	Daerah Pertanian
663	Daerah Pemukiman
664	Pusat Pertumbuhan
665	Transportasi
666	-
667	Pengamanan Lingkungan
<b>670</b>	<b>KETENAGAAN</b>
670.1	Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)
671	Listrik
671.1	Kelistrikan
671.11	Kelistrikan PLN
671.12	Kelistrikan non PLN
671.2	Pembangkit Tenaga Listrik
671.21	PLTA - Pembangkit Listrik Tenaga Air
671.22	PLTD - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
671.23	PLTG - Pembangkit Listrik Tenaga Gas

671.24	PLTM - Pembangkit Listrik Tenaga Matahari
671.25	PLTN - Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
671.26	PLTN - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
671.27	PLTU - Pembangkit Listrik Tenaga Uap
671.3	Transmisi tenaga listrik
671.31	Gardu Induk/gardu penghubung/gardu trafo
671.32	Saluran Udara Tenaga Listrik
671.33	Kabel Bawah Tanah
671.4	Distribusi Tenaga Listrik
671.41	Gardu Distribusi
671.42	Tegangan Menengah
671.43	Tegangan Rendah
671.44	Jaringan Bawah Tanah
671.5	Pengusahaan Listrik
671.51	Sambungan Listrik
671.52	Penjualan Tenaga Listrik
671.53	Tarif Listrik
672	Tenaga Air
673	Tenaga Minyak
674	Tenaga Gas
675	Tenaga Matahari
676	Tenaga Nuklir
677	Tenaga Panas Bumi
678	Tenaga Uap
679	Tenaga Lainnya
<b>680</b>	<b>PERALATAN PEKERJAAN UMUM</b>
<b>690</b>	<b>AIR MINUM</b>
691	<i>Intake</i>
691.1	<i>Broncaptering</i>
691.2	Sumur
691.3	Bendungan
691.4	Saringan ( <i>screen</i> )
691.5	Pintu air
691.6	Saluran pembawa
691.7	Alat ukur
691.8	Perpompaan
692	Transmisi air baku
692.1	Perpipaan
692.2	Katup Udara ( <i>Air Rolief</i> )
692.3	Tutup penguras ( <i>blow oof</i> )
692.4	Bak pelepas tekanan
692.5	Jembatan pipa
692.6	<i>Syphon</i>
693	Instalasi pengelolaan
693.1	Bangunan Ukur
693.2	Bangunan Aerasi

693.3	Bangunan Pengendapan
693.4	Bangunan Pembubuh bahan kimia
693.5	Bangunan Pengaduk
693.6	Bangunan Saringan
693.7	Perpompaan
693.8	<i>Clear Hell</i>
694	Distribusi
694.1	Reservoir menara bawah tanah
694.11	Menara
694.12	Reservoir menara bawah tanah
694.2	Perpipaan
694.3	Perpompaan
694.4	Jembatan pipa
694.5	Syphon
694.6	Hydran
694.61	Hydran umum
694.62	Hydran kebakaran
694.7	Katup
694.71	Katup Udara ( <i>air relief</i> )
694.72	Katup pelepas ( <i>blow off</i> )
694.8	Bak pelepas tekanan ( <i>pressuer reducing valve</i> )
<b>700</b>	<b>PENGAWASAN</b>
700.1	Kebijakan dan program pengawasan
700.2	Pengawasan perencanaan pengadaan/proyek
701	Bidang Urusan Dalam
702	Bidang Peralatan
703	Bidang Kekayaan Daerah
704	Bidang Perpustakaan/Dokumentasi/Kearsipan Sandi
705	Bidang Perencanaan
706	Bidang Organisasi / Ketatalaksanaan
707	Bidang Penelitian
708	Bidang Konferensi
709	Bidang Perjalanan Dinas
<b>710</b>	<b>BIDANG PEMERINTAHAN</b>
711	Pengawasan Pemerintahan Pusat
713	Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten
714	Pengawasan Pemerintah Desa
715	Bidang MPR/DPR
716	-
717	Bidang DPRD Kabupaten
718	Bidang Hukum
719	Bidang Hubungan Luar Negeri
<b>720</b>	<b>BIDANG POLITIK</b>
721	Bidang Kepartaian termasuk pendanaan partai, atribut partai dll
722	Bidang Organisasi Kemasyarakatan
723	Bidang Organisasi Profesi dan Fungsional



724	Bidang Organisasi Pemuda
725	Bidang Organisasi Buruh, Tani, dan Nelayan
726	Bidang Organisasi Wanita
727	Bidang Pemilihan Umum
<b>730</b>	<b>BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN</b>
731	Bidang Pertahanan
732	Bidang Kemiliteran
733	Bidang Perlindungan Masyarakat
734	Bidang Keamanan
735	Bidang Kejahatan
736	Bidang Bencana
737	Bidang Kecelakaan
737	-
<b>740</b>	<b>BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>
741	Pengawasan Pembangunan Desa
742	Pengawasan Pendidikan
743	Pengawasan Kebudayaan
744	Pengawasan Kesehatan/Makanan/Obat
745	Pengawasan SARA (Suku Agama Ras)
746	Pengawasan Kesejahteraan Sosial
747	Pengawasan Kependudukan Migrasi/Urbanisasi
748	Pengawasan Kehumasan, Media Massa dan Penyiaran
749	Pengawasan Bantuan/Subsidi Masyarakat
<b>750</b>	<b>BIDANG PEREKONOMIAN</b>
751	Pengawasan Perdagangan
752	Pengawasan Pertanian dan Perkebunan
753	Pengawasan Perindustrian
754	Pengawasan Pertambangan/ESDM
755	Pengawasan Perhubungan
756	Pengawasan Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian
757	Pengawasan PMDN/PMA
758	Pengawasan Perbankan/Moneter
759	Pengawasan Agraria
<b>760</b>	<b>BIDANG PEKERJAAN UMUM</b>
761	Pengawasan Pengairan
762	Pengawasan Jalan
763	Pengawasan Jembatan
764	Pengawasan Bangunan
765	Pengawasan Tata Ruang Kota
766	Pengawasan Tata Lingkungan
767	Pengawasan Ketenagaan
768	Pengawasan Air Minum
<b>770</b>	<b>PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK</b>
771	Penyimpangan Pejabat Publik
<b>780</b>	<b>BIDANG KEPEGAWAIAN</b>
781	Pengawasan Pengadaan PNS
782	Pengawasan Mutasi Pegawai

783	Bidang Kedudukan Pegawai
784	Bidang Kesejahteraan Pegawai
785	Bidang Cuti
786	Bidang Penilaian
787	Bidang Tata Usaha Kepegawaian
<b>790</b>	<b>BIDANG KEUANGAN</b>
791	Bidang Anggaran
792	Bidang Otorisasi
793	Bidang Verifikasi
794	Bidang Pembukuan
795	Bidang Perbendaharaan
796	Bidang Pembina Perbendaharaan
797	Bidang Pendapatan
799	-
<b>800</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>
	Termasuk klasifikasi disini : Kebijakan Kepegawaian
800.1	Perencanaan
800.2	Penelitian
800.3	Statistik
<b>810</b>	<b>PENGADAAN</b> Meliputi Lamaran, pengujian kesehatan dan pengangkatan calon pegawai
811	Pendaftaran CPNS
811.1	Testing
811.2	<i>Screening</i>
811.3	Pengumuman tes dan Pemanggilan
812	Pengujian Kesehatan
813	Pengangkatan CPNS
813.1	Pengangkatan CPNS golongan I
813.2	Pengangkatan CPNS golongan II
813.3	Pengangkatan CPNS golongan III
813.4	Pengangkatan CPNS golongan IV
813.5	Pengangkatan Calon Guru Inpres
814	Pengangkatan Tenaga Lepas
814.1	Pengangkatan Tenaga Bulanan/Kontrak
814.2	Pengangkatan Tenaga Harian
814.3	Pengangkatan Tenaga Pensiunan
815	-
816	-
817	-
<b>820</b>	<b>MUTASI</b>
821	Pengangkatan
821.1	Pengangkatan CPNS Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
821.11	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan I
821.12	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan II
821.13	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III
821.14	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV

821.15	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil yang Cuti Diluar Tanggungan Negara
821.2	Pengangkatan dalam jabatan struktural, pembebasan dari jabatan, berita acara serah terima jabatan, pernyataan menduduki jabatan, sumpah janji
821.21	Eselon 1
821.22	Eselon 2
821.23	Eselon 3
821.24	Eselon 4
821.25	-
821.26	Wedana/Pembantu Bupati
821.27	Camat
821.28	Lurah Administratif (Lurah Desa)
821.29	Jabatan Lainnya
821.3	Pengangkatan dalam jabatan fungsional, pemberhentian sementara, pengangkatan kembali, pernyataan menduduki jabatan, sumpah janji
822	Kenaikan Gaji Berkala
822.1	PNS Golongan I
822.2	PNS Golongan II
822.3	PNS Golongan III
822.4	PNS Golongan IV
823	Kenaikan Pangkat
823.1	PNS Golongan I
823.2	PNS Golongan II
823.3	PNS Golongan III
823.4	PNS Golongan IV
824	Pemindahan/Pelimpahan/Pembantuan
824.1	PNS Golongan I
824.2	PNS Golongan II
824.3	PNS Golongan III
824.4	PNS Golongan IV
824.5	Lolos Butuh (Mutasi Pegawai dari Instansi Lain)
825	Datasering dan Penempatan Kembali
826	Penunjukan Tugas Belajar
826.1	Dalam Negeri
826.2	Luar Negeri
826.3	Tunjangan Belajar
826.4	Penempatan Kembali
827	Wajib Militer
828	Mutasi dengan Instansi Lain
<b>830</b>	<b>KEDUDUKAN</b>
831	Peninjauan Masa Kerja
832	Penyesuaian Perangkat/Gaji
832.1	PNS Golongan I
832.2	PNS Golongan II
832.3	PNS Golongan III

832.4	PNS Golongan IV
833	Penghargaan Ijasah (pencantuman gelar)
834	Jenjang Pangkat/ Eselonering
<b>840</b>	<b>KESEJAHTERAAN PEGAWAI</b>
841	Tunjangan
841.1	Struktural dan Fungsional/Jabatan
841.2	Kehormatan
841.3	Dana Kematian (Uang Duka)
841.4	Tunjangan Hari Raya
841.5	Perjalanan Dinas Tetap/Cuti/Pindah
841.6	Keluarga
841.7	Sandang, Pangan, Papan
842	Dana
842.1	Taspen
842.2	Askes, Bantuan Kesehatan
842.3	Bantuan Pendidikan
843	Perawatan Kesehatan
843.1	Poliklinik, Klinik Konsultasi
843.2	Perawatan Dokter
843.3	Obat-obatan
843.4	Keluarga Berencana
844	Koperasi/Distribusi
844.1	Distribusi Pangan
844.2	Distribusi Sandang
844.3	Distribusi Papan
845	Perumahan PNS
845.1	Perumahan Pegawai
845.2	Tanah Kapling
845.3	Losmen/Hotel
846	Bantuan Sosial
<b>850</b>	<b>C U T I</b>
851	Cuti Tahunan
852	Cuti Besar
853	Cuti Sakit
854	Cuti Bersalin
855	Cuti Naik Haji/Umrah
856	Cuti di Luar Tanggungan Negara
857	Cuti Karena Alasan Penting
<b>860</b>	<b>PENILAIAN</b> Meliputi: Penghargaan, Hukuman, Konduite, Ujian Dinas, Penilaian Kekayaan Pribadi dan Rehabilitasi
861	Penghargaan
861.1	Bintang / Satyalencana Karya Satya
861.2	Kenaikan Pangkat Anumerta
861.3	Kenaikan Gaji Istimewa
861.5	Pegawai Teladan
862	Hukuman

862.1	Teguran Lisan/Ringan
862.2	Penundaan Kenaikan Pangkat/Sedang
862.3	Penurunan Pangkat/Berat
863	Konduite / DP3
864	Ujian Dinas
864.1	Tingkat I
864.2	Tingkat II
865	Penilaian Kinerja
865.1	Struktural
865.2	Fungsional
866	Rehabilitasi
<b>870</b>	<b>TATA USAHA KEPEGAWAIAN</b>
871	Formasi
872	Bezetting / Daftar Urut Kepegawaian
873	Registrasi, Sistem Informasi Kepegawaian
873.1	NIP
873.2	KARPEG
873.3	Legitimasi / Tanda Pengenal
873.4	Daftar Keluarga
873.5	KARSU / KARIS
874	Daftar Riwayat Pekerjaan
874.1	Tanggal Lahir
874.2	Penggantian Nama
875	Kewenangan Mutasi Kepegawaian
875.1	Pelimpahan Wewenangan
875.2	Spesimen Tanda Tangan
876	Penggajian
876.1	SKPP
877	Sumpah Pegawai
878	Korps Kepegawaian
879	-
<b>880</b>	<b>PEMBERHENTIAN</b>
881	Atas Permintaan Sendiri Termasuk Pengunduran Diri
882	Dengan Hak Pensiun
882.1	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun PNS Gol.I
882.2	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun PNS Gol.II
882.3	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun PNS Gol.III
882.4	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun PNS Gol.IV
882.5	Pensiun Janda / Duda
882.6	Pensiun Yatim Piatu
882.7	Uang Muka Pensiun
883	Karena Meninggal
884	Alasan Lain, Diantaranya Keuzuran Jasmani
885	Uang Pesangon
886	Uang Tunggu
887	Untuk Sementara Waktu



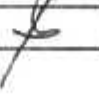

888	Tidak dengan Hormat
<b>890</b>	<b>PENDIDIKAN PEGAWAI</b>
891	Perencanaan
891.1	Program
891.2	Kurikulum dan Silabi
891.3	Proposal (TOR)
892	Pendidikan Regular/Kader
892.1	IPDN/APDN
892.1	Kursus-Kursus Reguler
893	Pendidikan-pendidikan dan Pelatihan
893.1	LEMHANAS Pendidikan dan Pelatihan struktural, SPATI, SPAMEN
893.2	SPAMA, ADUMLA, ADUM
893.3	Kursus-kursus Reguler
893.4	Diklat Teknik, Fungsional dan Manajemen Pemerintahan
893.5	Diklat Lainnya
894	Pendidikan Luar Negeri
894.1	Berkesinambungan/Berkala/Bergelar
894.2	Non Gelar/Diploma
895	Metode
895.1	Kuliah
895.2	Ceramah, Symposium
895.3	Diskusi, Raker, Seminar, Lokakarya, Orientasi
895.4	Tanya Jawab,/Silabi/Modul/Kursil
895.7	Penugasan
895.8	Gladi
896	Tenaga Pengajar, Narasumber
896.1	Moderator
897	Administrasi Pendidikan
897.1	Tahun Pelajaran
897.2	Persyaratan, Pendaftaran, <i>Testing</i> , Ujian
897.3	STTP
897.4	Penilaian Angka Kredit
897.5	Laporan Pendidikan dan Pelatihan
898	Fasilitas Pendidikan
898.1	Tunjangan Belajar
898.2	Asrama
898.3	Uang Makan
898.4	Uang Transport
898.5	Uang Buku
898.6	Uang Ujian
898.7	Uang Semester/Uang Kuliah
898.8	Uang Saku
899	Sarana Pendidikan
899.1	Bantuan Sarana Belajar
899.2	Bantuan Alat-alat Tulis
899.3	Bantuan Sarana Belajar Lainnya
<b>900</b>	<b>KEUANGAN</b>
901	Nota Keuangan

902	APBN
903	APBD
904	APBN-P
905	Dana Alokasi Umum
906	Dana Alokasi Khusus
907	Dekonsentrasi (Pelimpahan Dana dari Pusat ke Daerah)
<b>910</b>	<b>ANGGARAN</b>
911	Rutin
912	Pembangunan
913	Anggaran Belanja Tambahan
914	Daftar Isian Kegiatan (DIK)
914.1	Daftar Usulan Kegiatan (DUK)
915	Daftar Isian Proyek (DIP)
915.1	Daftar Usulan Proyek (DUP)
915.2	Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA)
916	Revisi Anggaran
<b>920</b>	<b>OTORISASI/SKO</b>
921	Rutin
922	Pembangunan
923	SIAP
924	Ralat SKO
<b>930</b>	<b>VERIFIKASI</b>
931	SPM Rutin
932	SPM Pembangunan
933	Penerimaan
934	SPJ Rutin
935	SPJ Pembangunan
936	Nota Pemeriksaan
937	SP Pemindahbukuan
<b>940</b>	<b>PEMBUKUAN</b>
941	Penyusunan Perhitungan Anggaran
942	Permintaan Data Anggaran Laporan Fisik Pembangunan
943	Laporan Fisik Pembangunan
<b>950</b>	<b>PERBENDAHARAAN</b>
951	Tuntutan Ganti Rugi
952	Tuntutan Bendaharawan
953	Penghapusan Kekayaan Negara
954	Pengangkatan/Pemberhentian Bendaharawan
955	Spesimen Tanda Tangan
956	Surat Tagihan Piutang, Ikhtisar Bulanan
<b>960</b>	<b>PEMBINAAN KEBENDAHARAWAN</b>
961	Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas
962	Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan
963	Laporan Keuangan Bendaharawan
964	-
965	-
<b>970</b>	<b>PENDAPATAN</b>
971	Perimbangan Keuangan

971.1	Bagi Hasil Pajak
971.11	Pajak Bumi Bangunan ( PBB )
971.12	Bela Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (PBHTB)
971.13	Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH Pasal 21)
971.2	Bagi Hasil Bukan Pajak
971.21	Sumber Daya Alam / Migas
972	Subsidi
973	Pajak
973.1	Pajak Kendaraan Bermotor
973.2	Pajak Kendaraan Diatas Air
973.3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
973.4	Pajak Pengendalian & Pemanfaatan Air Permukaan
973.5	Pajak Reklame
974	Retribusi
974.1	Retribusi Bidang Kesehatan
974.2	Retribusi Bidang Seni Budaya dan Pariwisata
974.3	Retribusi Bidang Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan (termasuk pasar)
974.4	Retribusi Bidang Pertanian dan Perternakan (termasuk pemotongan hewan)
974.5	Retribusi Bidang Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Teknologi (termasuk trayek, kelebihan muatan, telekomunikasi, parkir dll)
974.6	Retribusi Bidang Perkebunan dan Kehutanan (termasuk lintas dan lelang hasil hutan, flora fauna dll)
974.7	Retribusi Bidang Perikanan dan Kelautan
974.8	Retribusi Bidang Pertambangan, Pemanfaatan Air permukaan dan metrologi
974.9	Retribusi Bidang Lainnya (termasuk sampah)
975	Bea
975.1	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
975.2	Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air
976	Cukai
977	Pungutan
978	Bantuan
978.1	Bantuan Presiden
978.2	Bantuan Menteri
978.3	-
978.4	Bantuan Bupati
978.5	Bantuan Lainnya
979	Pendapatan Lainnya
979.1	Hasil penjualan asset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
979.11	Pelepasan Hak Atas Tanah
979.12	Penjualan Rumah Jabatan /Rumah Dinas
979.13	Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2
979.14	Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4



979.15	Penjualan Bongkaran Bangunan Dan Inventaris
979.16	Penjualan Drum Bekas
979.17	Penjualan Hasil Penebangan Pohon
979.2	Penerimaan Jasa Giro
979.21	Jasa Giro Kas Daerah
979.22	Jasa Giro Pemegang Kas
979.23	Jasa Giro Khusus
979.3	Penerimaan Bunga Bank
979.31	Bunga Deposito
979.32	Bunga Tabungan
979.4	Penerimaan Ganti Rugi Atas Kerugian Atau Kehilangan Kekayaan Daerah ( TP-TGR)
979.41	Sumbangan Pihak Ke Tiga
979.42	Sumbangan Pihak Ke Tiga Kendaraan (Daerah)
979.43	Sumbangan Pihak Ke Tiga Kayu
979.5	Penerimaan Lain-lain
979.51	Penerimaan Kembali Kredit Bank BKK
979.52	Ternak Tidak Layak Bibit
979.53	Sewa Internet
979.54	Penerimaan Dari Dana Bergulir / <i>Revolving</i>
979.55	Kerjasama Dengan BUMIDA
979.56	Penerimaan Duks
979.57	Tempat Rekreasi Nusakambangan
979.58	Seteron TP-TGR
979.59	Penerimaan Lainnya dari Setda / SKPD
<b>980</b>	-
<b>990</b>	<b>BENDAHARAWAN</b>
991	SKPP
992	Teguran SPJ
993	-
994	-
995	-

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Setda	
2		
3	Asisten. III	
4	Kabang Hukum	
5	Kabid. Perencanaan	

BUPATI BOMBANA

H. TAFDIL



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

KLASIFIKASI ARSIP  
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Arsip;
- b. bahwa klasifikasi arsip sangat diperlukan sebagai instrumen penciptaan, akses dan penggunaan, serta penyusutan arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Arsip di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 7).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
6. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
7. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

### BAB II PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP

#### Pasal 2

- (1) Pedoman Klasifikasi Arsip meliputi kode-kode dalam bentuk numerik yang disusun berdasarkan masalah, yang mencerminkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.